



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan masyarakat dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9);
 23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Sambas

(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 33), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	PENDAHULUAN	Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang	Bab I - 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Bab I - 2
	1.3 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	Bab I - 3
	1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.....	Bab I - 4
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022	Bab II - 1
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	Bab III - 1
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	Bab III - 1
	3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022.....	Bab III - 2
	3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022	Bab III - 3
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	Bab III - 5
	3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	Bab III - 6
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	Bab IV - 1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	Bab IV - 1
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	Bab IV - 3
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	Bab V - 1
BAB VI	PENUTUP	Bab VI - 1
	6.1 Kaidah Pelaksanaan.....	Bab VI - 1
	6.2 Tindak Lanjut.....	Bab VI - 1

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>halaman</i>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan Ke II Tahun 2022.....	Bab II - 1
3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2020 (%).....	Bab III - 2
3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2019-2021 Kabupaten Sambas Tahun 2021.....	Bab III - 2
3.3	Proyeksi Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022.....	Bab III - 7
3.4	APBD 2022 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022	Bab III - 8
4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	Bab IV - 1
4.2	Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	Bab IV - 5
5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	Bab V - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 pada tanggal 8 Juli 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian serta atas hasil evaluasi semester pertama tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan sehingga dilakukan Perubahan atas RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 33);

1.3. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun 2022 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.4. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2022 di daerah.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022

Memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2022.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat perubahan arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi target indikator kinerja tujuan pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kebijakan lainnya, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2022 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Dalam RKPD Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dikelompokkan ke dalam lima prioritas pembangunan yaitu:

1. Pemulihan ekonomi daerah melalui pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
 - Program **RUSIMAH** (Pengurusan Ijin di Rumah).
 - Program Tema **SIPINDU** (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu).
 - Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program **Pelayan diktan** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan).
 - Program **Pemuda Siap Kerja**
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program **PasminumMas** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan

pengembangan inovasi daerah; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :

- Program **E-Government**

5. Pemantapan kondisi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran hukum, penanggulangan bencana dan peningkatan wawasan kebangsaan; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :

- Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan insan madani)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2022, total penyerapan keuangan untuk belanja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terealisasi sebesar Rp. 414.140.821.327,00 dari target Rp. 1.740.534.272.712 atau sebesar 23,79% dimana seharusnya target penyerapan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 50,00%.

Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II Tahun 2022 Kabupaten Sambas dapat ditunjukkan berdasarkan tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Triwulan Ke II Tahun 2021

- Indikator dan target kinerja Regional Kabupaten Samba yang mengacu pada sasaran RPDP
 1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat 100%
 2. Peningkatan capaian indikator kinerja khusus sasaran 10-AMU Lahan: target 50% untuk target 70%
 3. Peningkatan nilai produksi dan pendapatan perkebunan sebesar 100%
 4. Tumbuhnya inovasi dan teknologi 100%
 5. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (Miliar Rupiah)		Berkas Capaian Kinerja Rencana Kerja PD Tahun 2022 (Miliar Rupiah)		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (%)	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (Miliar Rupiah)										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp								
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PEMEROLEHAN DAN PENYERAPAN AIR (PEMERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	2.924.433.881,00	25 %	323.282.778,89	56.844.720,00	100 %	323.282.778,89	137.491.828,89	40 %	225.151.179,00	56.844.720,00	75	19.861.419,00	15	19.77			
				100 %	2.924.433.881,00	25 %	323.282.778,89	56.844.720,00	100 %	323.282.778,89	56.844.720,00	100 %	323.282.778,89	137.491.828,89	40 %	225.151.179,00	56.844.720,00	75	19.861.419,00	15	19.77
				100 %	2.924.433.881,00	25 %	323.282.778,89	56.844.720,00	100 %	323.282.778,89	56.844.720,00	100 %	323.282.778,89	137.491.828,89	40 %	225.151.179,00	56.844.720,00	75	19.861.419,00	15	19.77
2	Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	27.814.828.948,89	25 %	4.368.873.224,19	5.104.087.132,89	100 %	4.368.873.224,19	1.272.288.379,89	50 %	2.094.198.841,00	5.104.087.132,89	75	6.372.293.928,00	22,00	22,00			
				100 %	27.814.828.948,89	25 %	4.368.873.224,19	5.104.087.132,89	100 %	4.368.873.224,19	1.272.288.379,89	100 %	4.368.873.224,19	1.272.288.379,89	50 %	2.094.198.841,00	5.104.087.132,89	75	6.372.293.928,00	22,00	22,00
				100 %	27.814.828.948,89	25 %	4.368.873.224,19	5.104.087.132,89	100 %	4.368.873.224,19	1.272.288.379,89	100 %	4.368.873.224,19	1.272.288.379,89	50 %	2.094.198.841,00	5.104.087.132,89	75	6.372.293.928,00	22,00	22,00
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	85.000.000,00	25 %	12.250.000,00	13.839.874,00	100 %	12.250.000,00	4.034.218,00	50 %	4.034.218,00	13.839.874,00	75	14.450.000,00	75	16,88			
				100 %	85.000.000,00	25 %	12.250.000,00	13.839.874,00	100 %	12.250.000,00	4.034.218,00	100 %	12.250.000,00	4.034.218,00	50 %	4.034.218,00	13.839.874,00	75	14.450.000,00	75	16,88
				100 %	85.000.000,00	25 %	12.250.000,00	13.839.874,00	100 %	12.250.000,00	4.034.218,00	100 %	12.250.000,00	4.034.218,00	50 %	4.034.218,00	13.839.874,00	75	14.450.000,00	75	16,88
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	31.500.000,00	25 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	14,13		
				100 %	31.500.000,00	25 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	14,13		
				100 %	31.500.000,00	25 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	5.250.000,00	9.000.000,00	100 %	14,13		
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	12.500.000,00	25 %	1.450.000,00	1.500.000,00	100 %	1.450.000,00	834.620,00	100 %	834.620,00	1.500.000,00	100 %	1.450.000,00	100 %	18,12			
				100 %	12.500.000,00	25 %	1.450.000,00	1.500.000,00	100 %	1.450.000,00	834.620,00	100 %	12.500.000,00	834.620,00	100 %	1.450.000,00	1.500.000,00	100 %	18,12		
				100 %	12.500.000,00	25 %	1.450.000,00	1.500.000,00	100 %	1.450.000,00	834.620,00	100 %	12.500.000,00	834.620,00	100 %	1.450.000,00	1.500.000,00	100 %	18,12		
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	22.872.877.894,00	25 %	3.254.862.862,00	3.207.868.139,00	100 %	3.254.862.862,00	1.076.553.311,00	50 %	1.076.553.311,00	3.207.868.139,00	75	5.117.657.624,00	26	22,37			
				100 %	22.872.877.894,00	25 %	3.254.862.862,00	3.207.868.139,00	100 %	3.254.862.862,00	1.076.553.311,00	100 %	22.872.877.894,00	1.076.553.311,00	50 %	1.076.553.311,00	3.207.868.139,00	75	5.117.657.624,00	26	22,37
				100 %	22.872.877.894,00	25 %	3.254.862.862,00	3.207.868.139,00	100 %	3.254.862.862,00	1.076.553.311,00	100 %	22.872.877.894,00	1.076.553.311,00	50 %	1.076.553.311,00	3.207.868.139,00	75	5.117.657.624,00	26	22,37
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	200 OR	20.718.577.594,00	40 OR	3.158.071.713,00	3.347.810.684,00	40 OR	3.158.071.713,00	877.532.123,00	80 OR	1.388.453.942,00	150	4.504.454.742,00	98	21,84				
				200 OR	20.718.577.594,00	40 OR	3.158.071.713,00	3.347.810.684,00	40 OR	3.158.071.713,00	877.532.123,00	80 OR	1.388.453.942,00	150	4.504.454.742,00	98	21,84				
				200 OR	20.718.577.594,00	40 OR	3.158.071.713,00	3.347.810.684,00	40 OR	3.158.071.713,00	877.532.123,00	80 OR	1.388.453.942,00	150	4.504.454.742,00	98	21,84				
8	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	5 dak	2.150.000,00	1 dak	392.868.860,00	400.864.640,00	1 dak	392.868.860,00	147.882.339,00	100 %	147.882.339,00	400.864.640,00	100 %	392.868.860,00	26	27,88			
				5 dak	2.150.000,00	1 dak	392.868.860,00	400.864.640,00	1 dak	392.868.860,00	147.882.339,00	100 %	2.150.000,00	147.882.339,00	100 %	392.868.860,00	26	27,88			
				5 dak	2.150.000,00	1 dak	392.868.860,00	400.864.640,00	1 dak	392.868.860,00	147.882.339,00	100 %	2.150.000,00	147.882.339,00	100 %	392.868.860,00	26	27,88			
9	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	25.000.000,00	25 %	1.768.339,00	1.786.709,00	200 %	1.768.339,00	1.786.709,00	100 %	1.786.709,00	1.786.709,00	100 %	1.768.339,00	7,15				
				100 %	25.000.000,00	25 %	1.768.339,00	1.786.709,00	200 %	1.768.339,00	1.786.709,00	100 %	25.000.000,00	1.786.709,00	100 %	1.768.339,00	7,15				
				100 %	25.000.000,00	25 %	1.768.339,00	1.786.709,00	200 %	1.768.339,00	1.786.709,00	100 %	25.000.000,00	1.786.709,00	100 %	1.768.339,00	7,15				
10	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	25.000.000,00	25 %	2.865.830,00	2.865.830,00	100 %	2.865.830,00	1.499.303,00	100 %	1.499.303,00	2.865.830,00	100 %	2.865.830,00	17,82				
				100 %	25.000.000,00	25 %	2.865.830,00	2.865.830,00	100 %	2.865.830,00	1.499.303,00	100 %	25.000.000,00	1.499.303,00	100 %	2.865.830,00	17,82				
				100 %	25.000.000,00	25 %	2.865.830,00	2.865.830,00	100 %	2.865.830,00	1.499.303,00	100 %	25.000.000,00	1.499.303,00	100 %	2.865.830,00	17,82				
11	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	100 %	784.000.000,00	25 %	42.860.154,00	259.302.840,00	100 %	42.860.154,00	61.888.845,00	90 %	68.020.793,00	259.302.840,00	75	117.662.812,00	70	11,09			
				100 %	784.000.000,00	25 %	42.860.154,00	259.302.840,00	100 %	42.860.154,00	61.888.845,00	90 %	784.000.000,00	61.888.845,00	90 %	68.020.793,00	259.302.840,00	75	117.662.812,00	70	11,09
				100 %	784.000.000,00	25 %	42.860.154,00	259.302.840,00	100 %	42.860.154,00	61.888.845,00	90 %	784.000.000,00	61.888.845,00	90 %	68.020.793,00	259.302.840,00	75	117.662.812,00	70	11,09
12	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	5 paket	275.500.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	19,87				
				5 paket	275.500.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	275.500.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	19,87				
				5 paket	275.500.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	100 %	275.500.000,00	54.400.000,00	100 %	54.400.000,00	19,87				
13	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Samba	PROGRAM PERSIAPAN DAN PENYERAPAN AIR (PEPERSA) dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator Kinerja Program (jika ada) (target)	5 dak	277.000.000,00	1 dak	41.250.359,00	41.032.076,00	100 %	41.250.359,00	7.128.845,00	100 %	7.128.845,00	41.032.076,00	100 %	41.250.359,00	20	19,73			
				5 dak	277.000.000,00	1 dak	41.250.359,00	41.032.076,00	100 %	41.250.359,00	7.128.845,00	100 %	277.000.000,00	7.128.845,00	100 %	41.250.359,00	20	19,73			
				5 dak	277.000.000,00	1 dak	41.250.359,00	41.032.076,00	100 %	41.250.359,00	7.128.845,00	100 %	277.000.000,00	7.128.845,00	100 %	41.250.359,00	20	19,73			

Kode/SP/PPH	Program/Proyek/Kegiatan	Bentuk/Modal/Tipe	PK	50,000,000	9	PK	12	Bn	8,999,831	2	Bn	1,622,203	3,87	Bn	1,016,296	1	Bn	4,524,233	5,352,293	6,571/1	0,29	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Dxc	50,000,000	0	PK	12	Bn	23,449,945	3	Bn	531,088	0,97	Bn	1,909,934	1 <td>Bn</td> <td>6,620,422</td> <td>6,620,422</td> <td>0,16</td> <td>0,14</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	6,620,422	6,620,422	0,16	0,14	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Dxc	75,000,000	9	PK	2	Bn	10,051,325	1 <td>PK</td> <td>2,526,469</td> <td>1,89</td> <td>Bn</td> <td>4,036,437</td> <td>1 <td>Bn</td> <td>7,602,291</td> <td>7,602,291</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>DPP/KA</td> </td>	PK	2,526,469	1,89	Bn	4,036,437	1 <td>Bn</td> <td>7,602,291</td> <td>7,602,291</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	7,602,291	7,602,291	0,14	0,14	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Dxc	50,000,000	0	PK	5	Bn	18,746,381	1 <td>PK</td> <td>2,526,469</td> <td>1,89</td> <td>Bn</td> <td>4,036,437</td> <td>1 <td>Bn</td> <td>7,602,291</td> <td>7,602,291</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>DPP/KA</td> </td>	PK	2,526,469	1,89	Bn	4,036,437	1 <td>Bn</td> <td>7,602,291</td> <td>7,602,291</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	7,602,291	7,602,291	0,14	0,14	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	PK	4,091,307,325	0	PK	1 <td>PK</td> <td>86,849,485</td> <td>0</td> <td>PK</td> <td>10,541,636</td> <td>0,13</td> <td>Bn</td> <td>11,448,272</td> <td>1 <td>Bn</td> <td>22,872,314</td> <td>22,872,314</td> <td>0,21</td> <td>0,21</td> <td>DPP/KA</td> </td>	PK	86,849,485	0	PK	10,541,636	0,13	Bn	11,448,272	1 <td>Bn</td> <td>22,872,314</td> <td>22,872,314</td> <td>0,21</td> <td>0,21</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	22,872,314	22,872,314	0,21	0,21	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	PK	4,091,307,325	0	PK	16	Bn	908,333,881	0	PK	1,026,320	0,26	Bn	1,450,276	1 <td>Bn</td> <td>24,022,292</td> <td>24,022,292</td> <td>0,21</td> <td>0,21</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	24,022,292	24,022,292	0,21	0,21	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	75,000,000	0	Bn	1	Dc	37,251,488	0	Dc	8,381,320	0,19	Bn	12,299,679	1 <td>Bn</td> <td>21,161,729</td> <td>21,161,729</td> <td>0,24</td> <td>0,24</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	21,161,729	21,161,729	0,24	0,24	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	4,099,302,206	9	PK	5	PK	1,099,317,645	0	PK	2,111,218	0,13	Bn	1,684,402	1 <td>Bn</td> <td>13,280,249</td> <td>13,280,249</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	13,280,249	13,280,249	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	5,444,847,096	0	PK	5	PK	794,613,487	0,04	PK	5,308,694,000	0,13	Bn	6,296,237	1 <td>Bn</td> <td>11,280,249</td> <td>11,280,249</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	11,280,249	11,280,249	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	50,000,000	0	PK	12	Bn	29,999,947	2,12	Bn	9,201,353,000	0,16	Bn	2,252,274	1 <td>Bn</td> <td>11,246,409</td> <td>11,246,409</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	11,246,409	11,246,409	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	107,143,617	0	PK	1	PK	49,999,789	0,03	PK	3,844,183,000	0,16	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>6,267,129</td> <td>6,267,129</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	6,267,129	6,267,129	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	29,999,906	0	PK	27	Bn	83,246,858	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	21,000,000	0	Bn	12	Bn	8,019,000	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	1,250,075,000	0	Bn	1	PK	27,428,682	0,07	PK	1,071,000	0,22	Bn	8,149,200	1 <td>Bn</td> <td>14,082,000</td> <td>14,082,000</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	14,082,000	14,082,000	0,01	0,01	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	599,995,504	0	Bn	1	PK	82,423,819	0	PK	662,000	0,18	Bn	12,101,620	1 <td>Bn</td> <td>32,272,759</td> <td>32,272,759</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	32,272,759	32,272,759	0,01	0,01	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	5,115,551,735	0	Bn	22	PK	1,376,503,595	0	PK	6,154,203	0,17	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>3,154,203</td> <td>3,154,203</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	3,154,203	3,154,203	0,01	0,01	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	1,800,200,200	0	Bn	12	Bn	17,913,581	0	PK	1,591,000	0,19	Bn	2,297,230	1 <td>Bn</td> <td>12,271,392</td> <td>12,271,392</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	12,271,392	12,271,392	0,01	0,01	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	50,000,000	0	PK	1	PK	48,010	0,01	PK	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	160,200,200	0	Bn	12	Bn	48,010	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	25,900,000	0	Bn	12	Bn	48,010	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	PK	50,000,000	0	Bn	12	Bn	48,010	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	370,200,000	0	Bn	12	Bn	48,010	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	1,630,000,913	0	Bn	12	Bn	48,010	0,01	Bn	4,091,307,325	0,13	Bn	2,164,646	1 <td>Bn</td> <td>2,164,646</td> <td>2,164,646</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>DPP/KA</td>	Bn	2,164,646	2,164,646	0,20	0,20	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	334,074,217	0	Bn	12	Bn	34,999,581	1	Bn	2,882,214	2,07	Bn	4,091,307,325	3	Bn	6,620,422	6,620,422	0,03	0,03	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	21,200,000	9	Bn	12	Bn	2,882,214	1	Bn	4,091,307,325	2,07	Bn	4,091,307,325	3	Bn	6,620,422	6,620,422	0,03	0,03	DPP/KA
Kode/SP/PPH	Revisi/Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas	Perbaikan Bangunan	Bn	150,000,000	0	Bn	12	Bn	2,882,214	1	Bn	4,091,307,325	2,07	Bn	4,091,307,325	3	Bn	6,620,422	6,620,422	0,03	0,03	DPP/KA

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3,101,578,834	2,854,608,371	2,852,056,935	542,146,743	62,733,476	0	0	604,850,219	1,449,488,590												
	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		135,119,613	139,110,987	65,800,188	9,309,974	7,884,825	0	0	17,188,799	156,299,786												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rencana kerja, renstra dinas komunikasi dan informatika kabupaten sambas yang terusun	1Dok	8,000,000	2 Dok	19,401,780	2 Dok	12,144,898	1 Dokum en	2,976,678	2,442,220							5,418,898	1 Dok	24,820,678	310	310.26	KOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah rka/dpa dinas komunikasi dan informatika kabupaten sambas selama	1Dok	7,000,000	12 Bln	15,000,149	1 Dok	7,634,048		3,714,518	0							3,714,518		18,714,667	267	267.35	KOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lkip skpd yang terusun selama satu tahun	1Dok	6,000,000	12 Bln	8,500,866	1 Dok	6,012,748		2,612,778	0							2,612,778		11,113,644	185	185.23	KOMINFO
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya monitoring evaluasi dan pelaporan serta BMD pada Dinas Komunikasi dan	100%	114,119,613	12 Bln	96,208,192	12 Bln	40,008,494		1 bln	5,442,605							5,442,605		101,650,797	89	89.07	KOMINFO
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,547,631,769	1,935,921,425	2,119,519,725	386,535,839	12,909,372			399,445,205	2,315,366,630												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada ASN setiap tahunnya	24 orang/ bln	2,410,631,769	14 Bln	1,827,319,287	24 orang/bl n	1,938,121,342	6 Orang	361,239,275								361,239,275	28 Bln	2,188,558,562	91	90.79	KOMINFO
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelolaan keuangan yang mendapat honorarium selama setahun	2 Dokum en	130,000,000	14 org	96,354,666	2 Dok	175,700,480		25,296,558	12,909,372							38,205,930	32 orang	134,560,596	104	103.51	KOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun selama satu tahun	1 Laporan	7,000,000	12 bln	12,247,472	1 laporan	5,697,903										0	24 Bln	12,247,472	175	174.96	KOMINFO
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15,127,452	0	17,522,000	0	17,522,000		0	0	0							0		0	0	0.00	KOMINFO
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur selama satu tahun	2 orang	15,127,452			2 Orang	17,522,000										0		0	0	0.00	KOMINFO
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		179,000,000	287,509,659	204,870,876	82,354,496	13,902,076			96,256,572	313,766,231												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama satu tahun	6 paket	6,000,000	12 bln	7,227,300	6 paket	5,586,535	2 Paket	1,941,535	1 Paket	911,250						2,852,785	24 Bln	10,080,085	168	168.00	KOMINFO
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan barang kebersihan kantor yang tersedia selama satu tahun	5 paket	6,000,000	12 bln	4,515,855	5 paket	3,569,276	2 paket	1,463,482	0							1,463,482	24 Bln	5,979,337	100	99.66	KOMINFO
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun	25 paket	35,000,000	12 bln	37,361,864	25 paket	35,007,608	12 Paket	16,924,316	1 Paket	1,979,630						18,903,946	24 Bln	16,265,810	161	160.76	KOMINFO

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun (n-1) yang dievaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				I	II		III	IV	190	190.49								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama satu tahun	4 paket	7,000,000	12 bln	9,635,051	4 paket	4,299,457	2 paket	2,499,463	2 Paket	1,199,996	3,699,459	24 Bln	13,334,510	190	190.49	KOMINFO
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan yang tersedia selama satu tahun	2 paket	5,000,000	12 bln	2,155,000	2 paket	3,000,000				-	0	24 Bln	2,155,000	43	43.10	KOMINFO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat dan koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	3 laporan	120,000,000	12 bln	226,614,589	3 laporan	153,408,000	1 Bln	59,525,700		9,811,200	69,336,900	24 Bln	255,951,489	247	246.63	KOMINFO
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			60,000,000		282,870,000		221,800,000		0		0			282,870,000			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk operasional Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sambas					4 Unit	116,360,000				0				#DIV/0!		
	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler (meja dan kursi)	3 Unit	10,000,000		8,505,000.00	5 Unit	8,180,000				0	7bh Kursi, 5 bh		8,505,000	85	85.05	KOMINFO
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat pendingin, alat studio, dan komputer	5 Unit	50,000,000	5 unit	274,365,000.00	1 Unit AC, 4 Unit komputer dan peralatan komputer	97,260,000				0	2 ac, 18 alat studio, 8 komputer		274,365,000	549	548.73	KOMINFO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,000,000		81,579,611		112,639,146		21,727,940		10,560,753	32,388,693		113,968,304			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya buku cek dan material	2 Laporan	3,000,000		2,900,000.00	2 Laporan	3,500,000				900,000	900,000		3,800,000	127	126.67	KOMINFO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumber daya air, listrik dan internet	3 laporan	12,000,000	12 bln	78,679,611.00	3 laporan	109,139,146	1 laporan	21,727,940	1 Laporan	9,760,753	31,488,693	24 bln	110,168,304	918	918.07	KOMINFO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150,000,000		137,616,689		139,905,000		42,224,500		17,376,450	59,600,950		197,217,639			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	120,000,000	10 kendaraan	119,270,689.00	6 unit	122,905,000	2 kendaraan	40,574,500	1 Kendaraan	15,586,450	56,160,950	18 kendaraan	175,431,639	146	146.19	KOMINFO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan komputer	8 unit	7,000,000	12 Bln	4,260,000.00	8 unit	4,300,000			1 Unit	690,000	690,000	21 bln	4,950,000	71	70.71	KOMINFO

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1	2	3	4	I	II	III	IV	5	6		7	8			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan selama satu tahun	1 unit	15,000,000	12 Bln	7,986,000.00	1 Unit	6,600,000	1,650,000	1,100,000			2,750,000	24 bln	10,736,000	72	71.57	KOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor	3 unit	8,000,000	12 Bln	6,100,000.00	3 Unit	6,100,000		0			0	24 bln	6,100,000	76	76.25	KOMINFO
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Data Center		930,000,000		1,371,381,132		982,180,883	78,966,693	12,361,517			64,423,414		1,405,804,746			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			115,000,000		749,504,616		192,334,682	19,522,897	0			19,522,897		799,027,513			
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Doamain Dan Sub Domaian Yang terlayani	44 dokumen	15,000,000	17 OPD	121,547,353.00	17 OPD	77,717,647	1 Dokum en	6,190,580			6,190,580	2 dok	127,737,933	852	851.59	KOMINFO
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur jaringan internet dan internet baik kabel maupun nirkabel	24 unit	100,000,000	1 Dok, 44 OPD	627,957,263.00	1 Dok, 44 OPD	114,617,035	1 dokum en	13,332,317			13,332,317	3 Desa	641,289,580	641	641.29	KOMINFO
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah			815,000,000		621,876,516.00		789,846,201.00	59,443,796	12,361,917.00			44,900,717.00		666,777,233.00			
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana	Jumlah Pengembangan	1 Dok	140,000,000			1 Dok	75,802,196.00	24,286,096	2,618,900			26,904,996.00		26,904,996.00	19		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi pada database dan penambahan server	44 unit	450,000,000	42 OPD	399,353,308.00	42 OPD	372,420,621	1 OPD	5,652,626			8,271,526	33 OPD	407,624,834	91	90.58	KOMINFO
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah opd yang terhubung dan memanfaatkan Jaringan Komunikasi Intra Berbasis suara, video Teks, data dan sinyal lainnya	1 dokumen	15,000,000			42 OPD	49,824,326	1 OPD	4,305,645			4,305,645		4,305,645	29	28.70	KOMINFO
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pemeliharaan website resmi kabupaten sambas	15 unit	150,000,000	1 Aplikasi	64,985,379.00	1 Aplikasi	148,785,217		6,383,266			6,383,266	24 Bln	71,368,645	48	47.58	KOMINFO
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah BTS yang di awasi dan Jumlah nilai redistribusi Pengendalian menara telekomunikasi	250 Menara	200,000,000	250 Menara	157,537,829.00	250 Menara	143,013,841	28 Menara	18,816,163	10 Menara	7,124,117	25,940,280	19 kali	183,478,109	92	91.74	KOMINFO
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rasio penyebaran informasi ke desa-desa di Kabupaten		430,000,000		438,400,561		523,054,742	48,848,422	34,577,013			82,070,569		120,474,130			

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	Realisasi Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Unit Perangkat		
				5		6		7		8		9		10		11		12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	k	Rp
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.941.492.826			1.181.893.613			1.399.064.407			3.080.958.022					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.690.327			18.555.250			33.001.550			51.556.800						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	24.998,615				10 Buku	4.999,723	0		2.400,100			2.598,900				PUPR		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan SKPD	758,580,945				3 Dok	100,716,189	0		13,587,350			27,997,200				PUPR		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Nilai Akuntabilitas Pertanggung jawaban Kinerja SKPD	24,917,075				12 Bln	4,974,415	6 Bln		2,567,800			2,405,450				PUPR		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,177,975,828			853,064,227			1,423,395,634				2,276,459,861		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	29,094,824,080				14 Bln	5,027,725,828	2 Bln		853,064,227			1,423,395,634				2,276,459,861		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	872,250,000				12 Bln	150,250,000	0		0			0				0		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							354,139,869			37,907,270			109,832,608				147,739,878		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kelengkapan listrik yang tersedia	105,086,250				12 Bln	21,017,250	2 Bln		2,394,250			9,311,750				11,706,000		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ruang Kantor yang terjaga kebersihannya	134,070,690				12 Bln	26,814,138	2 Bln		3,825,650			10,346,650				14,172,300		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	75,118,820				12 Bln	15,023,764	1 Bln		0			7,430,450				7,430,450		
		Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Barang cetakan dan pengadaan	133,293,585				12 Bln	26,658,717	1 Bln		5,724,050			9,227,950				14,952,000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	192,200,000				12 Bln	38,440,000	3 Bln		6,660,000			6,660,000				13,320,000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah, Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai tamu	1.190,753,692				12 Bln	226,186,000	1 Bln		19,303,320			66,855,808				86,159,128		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,117,503,232			238,162,368			267,037,815				505,200,183		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Surat Menyurat	4,300,000				12 Bulan	500,000	0		0			500,000				500,000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	713,619,360				12 Bln	111,723,872	2 Bln		24,606,368			24,686,815				49,293,183		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran	4,598,330,385				12 Bln	1,005,279,360	2 Bln		213,556,000			241,851,000				455,407,000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah							181,183,564			34,204,500			65,796,800				100,001,300		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	753,407,883				12 Bln	79,990,000	2 Bln		16,601,300			30,696,300				47,297,600		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Berat yang rutin diperbaiki (servis), jumlah pemeliharaan/berkala komputer	705,952,820				12 Bln	72,170,564	0		17,603,200			27,170,500				44,773,700		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	270,965,000				12 Bln	14,993,000	0		0			0				0		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	288,015,647				12 Bln	14,030,000	1 Bln		0			7,930,000				7,930,000		
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik				162,765,004,718			1,732,809,022			1,618,951,578			3,405,916,388					
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					162,765,004,718			1,732,809,022			1,618,951,578			3,351,760,600					
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,850,000,000				12 bln	505,000,000	1 Bln		504,680,000			504,680,000				1,009,360,000		
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun					83 Paket				186,073,600			306,492,493				492,566,093		
			Panjang Jalan Poros Desa yang dibangun	304,453,842,949				331 Paket	103,905,958,145												
		Rehabilitasi Jalan	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Dasar Pekerjaan Umum dan bidang Jalan	191,052,499,405				1 Paket	37,490,499,881,00			967,210,953,00			711,108,635				1,678,319,588		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang direhab	25,705,238,065					0			0			0				0		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang direhab persentase alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baik	69,887,941,490				12 paket	100%	4,906,047,613		25,900,990			18,810,172				44,711,162		
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dibangun	4,799,999,405				7 Paket				42,078,907			74,926,034				117,004,941		
			Jumlah Jembatan Poros Desa yang dibangun					84 Paket	15,127,499,198												
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan rusak insidental yang direhab					1 Paket	829,999,881,00			6,864,572			2,934,244				9,798,816		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	Realisasi Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Unit Perangkat				
							I		II		III		IV						12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x	15
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik			33,403,427,823		33,600,000		20,555,788				54,155,788								
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota				12,109,557,541		0		0												
		Pembangunan Unit Air Baku Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah dokumen pengembangan Air	1,000,000,000		2 Dok	132,000,000		0	0				0			PUPR					
			Jumlah Kegiatan Penigkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali	43,607,174,567		33 paket	11,977,557,541		0	0				0			PUPR					
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kabupaten/kota				21,293,870,282		33,600,000		20,555,788				54,155,788								
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Dokumen IPDMIP			100%											PUPR					
			Jumlah Kegiatan Operasional Komisi			1 tahun											PUPR					
			Panjang Jaringan Irigasi yang direhab	114,939,886,569		140 paket	21,258,596,282		33,600,000	15,300,000				48,900,000			PUPR					
			panjang rehabilitasi jaringan irigasi IPDMIP yang direhab			6 paket											PUPR					
		Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terkoordinasinya Kinerja pemeliharaan jaringan Irigasi	252,170,000		1 tahun	35,274,000		0	5,255,788				5,255,788			PUPR					
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				199,999,906		47,754,701		28,904,013				77,658,712								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				50,000,083		16,472,005		12,121,705				28,593,710								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pengawasan teknis terhadap kinerja Turbinak penataan ruang melalui Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, inklusif dan berkelanjutan	1,515,000,415		50,000,083.00		0,3 Bln	16,472,005	12,121,705				28,593,710			PUPR					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				99,999,792		22,585,054		12,530,269				35,115,323								
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang yang sinergis dan konsisten di Kabupaten Sambas	1,399,998,960		30 kali	99,999,792		22,585,054	12,530,269				35,115,323			PUPR					
			Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, inklusif dan			1 tahun											PUPR					
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)				49,999,631		8,697,642		5,252,037				13,949,679								
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. Koordinasi lintas sektor dan instansi di Kabupaten Sambas dalam Rangka legislasi RTRW dan RDTR di Kab. Sambas. Kajian Teknis Tata Ruang sebagai syarat Proses Perijinan Pemanfaatan Ruang	1,447,597,216		30 Kali	49,999,631.00		6 Kali	8,697,642	5,252,037			13,949,679								
4		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				17,644,999,732		194,968,900		196,935,475				309,614,825								
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung				12,971,078,483		179,140,600		130,474,225				309,614,825								
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kinerja pembangunan bidang gedung perkantoran						0								PUPR					
			Bangunan dan Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor														PUPR					
			Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor Pemerintah	52,039,517,866		2 Paket											PUPR					
						12,971,078,483		179,140,600		130,474,225												

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2022 diarahkan untuk memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 dengan mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan bidang lainnya.

Arah Kebijakan ekonomi tersebut didukung dengan pembangunan sektor infrastruktur dasar, aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan, serta dengan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang melambat. Berdasarkan data rilis dari BPS pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas mengalami perlambatan sebesar 4,76 % dari tahun sebelumnya yakni 5,03 %.

Perekonomian Kabupaten Sambas di tahun 2020 yang diukur dari PDRB atas harga berlaku mencapai Rp 20,67 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp38,40 juta. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas di tahun 2020 mengalami perlambatan yang signifikan hingga -2,02 persen dibanding tahun 2019.

Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dilakukan guna menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah dan berbagai kegiatan bisnis, pembatasan sosial menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi dan produksi lapangan usaha. Termasuk Di Kabupaten Sambas beberapa kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 seperti penutupan PLBN Aruk, sangat memperangaruhi arus mobilitas orang/warga melalui pintu perbatasan. Hal ini berdampak pada sektor-sektor pendukung seperti transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor-sektor lainnya. Dari sisi produksi kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya yang masing-masing sebesar -19,18 dan -16,55 persen.

Disisi lain ada beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, diantaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,57 persen; Informasi dan komunikasi sebesar 8,12 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,98 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,62 persen dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,04 persen.

Pada Tahun 2020 struktur ekonomi Kabupaten Sambas masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,62 persen (meningkat dari tahun 2019 yakni 32,54 persen), perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,02 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 11,64 persen. Sedangkan 14 lapangan usaha lainnya masing-masing berkontribusi dibawah 9 persen.

Gambaran rinci tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2020(%)

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sambas	4,78	5,24	5,06	4,93	4,76	-2,02
2	Bengkayang	3,96	5,15	5,62	5,37	5,23	-1,99
3	Landak	5,11	5,28	5,17	5,09	5,01	-0,67
4	Mempawah	5,62	5,99	5,87	5,82	5,81	0,19
5	Sanggau	3,68	5,34	4,48	4,45	4,30	0,70
6	Ketapang	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,50
7	Sintang	4,57	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19
8	Kapuas Hulu	4,66	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43
9	Sekadau	5,75	5,93	5,82	5,87	4,49	-0,98
10	Melawi	4,70	4,75	4,70	5,38	4,97	-1,10
11	Kayong Utara	5,03	5,98	5,37	5,01	5,04	-0,74
12	Kubu Raya	6,35	6,37	6,54	5,62	5,82	-2,43
13	Kota Pontianak	4,99	5,08	4,96	5,91	4,81	-3,97
14	Kota Singkawang	6,17	5,17	5,38	4,70	4,53	-2,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Sedangkan gambaran perkembangan indikator makro Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Utama	2019 ^{**})	2020 ^{**})	2021 ^{**})	2022 ^p)	2022 ^{PRKPD})
1	Persentase Konektivitas Antar Desa	86,09	92,05	85,00	96,05	-
2	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	60,42	64,39	63,72	67,40	-
2	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	-	-	-	-	69,25
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,76	-2,02	4,37	3,35 - 4,63	3,35 - 4,63
4	IPM	67,02	67,03	67,10	68,65 - 69,07	68,46 - 68,66
5	Kemiskinan (%)	8,19	7,70	7,66	7,58 - 7,16	7,58 - 7,16
6	Tingkat Pengangguran (%)	3,58	3,71	3,97	3,42 - 3,12	3,42 - 3,12
7	Capaian Status Kemajuan	8	38	65	56	80

No	Indikator Kinerja Utama	2019 ^{**})	2020 ^{**})	2021 ^{**})	2022 ^p)	2022 ^{PRKPD})
Desa Mandiri						
8	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil Evaluasi AKIP)	B	B	B	BB	BB
9	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan PEMDA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB

Sumber : ^{**}= BPS (diolah); p = Proyeksi RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kab. Sambas Tahun 2022

Pada tahun 2022, perekonomian global sedang dalam bayang-bayang resesi, pelaksanaan vaksinasi dan berakhirnya wabah covid-19 masih belum ada kepastian sehingga Kabupaten Sambas pada tahun 2022 memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,35% - 4,63%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Secara makro tantangan pembangunan ekonomi mengedepankan "Pembangunan Ekonomi Inklusif" melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok.

Terdapat tiga pilar dasar yaitu Pilar 1 berorientasi pada Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi, Pilar 2 berorientasi pada Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Pilar 3 berorientasi pada Perluasan Akses dan kesempatan.

Adapun tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Ketidaktentuan akan berakhirnya Pandemi Covid 19 yang masih mempengaruhi seluruh sektor perekonomian
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Ketergantungan yang besar kepada Pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih mandiri khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
5. Pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sambas masih dihadapkan pada ancaman bahaya banjir dan kekeringan serta gangguan hama penyakit yang berakibat gagal panen serta menyempitnya lahan-lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
6. Belum stabilnya perekonomian dunia/bayang-bayang resesi dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap perekonomian fluktuasi nilai mata uang rupiah memungkinkan

terjadinya pengaruh terhadap permintaan internasional terhadap beberapa komoditi penduduk seperti sawit, karet, kelapa dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberian stimulan dalam rangka menciptakan daya ungkit sektor dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
2. Perlunya penguatan konsumsi domestik misalnya melalui penyelenggaraan even-even wisata daerah dan pengembangan produk-produk berbasis konsumsi domestik dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif melalui sentuhan kearifan local dengan penerapan protokoler kesehatan
3. Penguatan suprastruktur melalui dukungan regulasi tentang perijinan yang jelas dan terarah melalui pelayanan perizinan satu atap dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mendorong investasi.
4. Menciptakan dan mengembangkan secara optimal sentra-sentra ekonomi berbasis spesialisasi sektoral dan kewilayahan serta mendorong industri pengolahan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor-faktor produksi.
7. Meningkatkan daya saing daerah agar dapat bersaing dengan produk-produk daerah lain.
8. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
9. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk.
10. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan yang lebih berkualitas, mandiri dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing dengan di pasar internasional.
12. Penguatan Fasilitas Kesehatan
13. Program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM

Adapun peluang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sambas yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah
- b. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw.

- c. Dampak pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dan Ruas Jalan Nasional Tebas-Jembatan Sambas Besar – Merbau, Jalan Merbau-Temajuk dan Jalan Sejajar Temajuk – Aruk.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas menjadi salah satu prioritas pembangunan Kawasan Pariwisata yang termuat dalam RPJMN 2020-2024
- e. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2021-2023 diantaranya peningkatan dan rehabilitasi jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Sambas, yaitu ruas jalan Bantanan I-Bantanan II, Jalan Simpang Tanjung-Tanah Hitam dan Jalan Tanah Hitam-Merbau.
- f. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menuntaskan pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Sambas.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2022 diarahkan pada penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

- Penguatan regulasi terkait Pendapatan dan Peningkatan Kerjasama dengan instansi terkait.
- Pengembangan kapasitas aparatur di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Menyediakan sarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dan inovatif

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata serta menyeluruh.

Selain itu, belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Kelompok Belanja Operasi terdiri dari : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa ; 3) Belanja Bunga ; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja Bantuan Sosial. Kelompok Belanja Transfer terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil; 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja operasi yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja lainnya yakni untuk belanja bunga, belanja hibah, belanja sosial serta belanja modal dan belanja tak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan anggaran.

Sesuai dengan uraian di atas, maka kebijakan belanja daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yaitu:

- Pemulihan ekonomi daerah melalui pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan.
- Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan budaya saing.
- Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah.
- Pemantapan kondisi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran hukum, penanggulangan bencana dan peningkatan wawasan kebangsaan.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada pembiayaan penerimaan yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (*investasi penerimaan daerah*), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dinyatakan "Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus". Struktur pembiayaan daerah mencerminkan kinerja anggaran daerah apakah mengalami defisit ataukah surplus.

Apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa : a) Pembentukan dana cadangan b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c) Pembayaran pokok utang d) Pemberian pinjaman daerah.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perkembangan keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sambas dari Proyeksi RKPD Tahun 2022, APBD Tahun 2022 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah
Perubahan RKPD Kab. Sambas 2022

Kode	Uraian	Proyeksi RKPD 2022	APBD 2022	Proyeksi Perubahan RKPD 2022
4	PENDAPATAN	1.901.219.234.701	1.758.305.522.712	1.777.780.522.712
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.518.852.811	189.205.142.901	189.205.142.901
4.1.01	Pajak Daerah	46.036.463.733	83.565.977.908	83.565.977.908
4.1.02	Retribusi Daerah	4.819.100.300	4.543.103.200	4.543.103.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.231.061.793	3.231.061.793	3.231.061.793
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	82.432.226.985	97.865.000.000	97.865.000.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.721.579.481.890	1.528.267.086.311	1.547.742.086.311
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.649.409.531.080	1.448.684.581.000	1.448.684.581.000
4.2.01.01	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>1.426.332.897.080</i>	<i>1.263.167.401.000</i>	<i>1.263.167.401.000</i>
4.2.01.01.	<i>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</i>	<i>39.882.465.840</i>	<i>31.426.036.000</i>	<i>31.426.036.000</i>
4.2.01.01.	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>951.509.838.240</i>	<i>804.339.073.000</i>	<i>804.339.073.000</i>
4.2.01.01.	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>245.996.824.000</i>	<i>127.230.109.000</i>	<i>127.230.109.000</i>
4.2.01.01.	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>188.943.769.000</i>	<i>300.172.183.000</i>	<i>300.172.183.000</i>
4.2.01.02	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	<i>20.184.600.000</i>	<i>5.151.026.000</i>	<i>5.151.026.000</i>
4.2.01.05	<i>Dana Desa</i>	<i>202.892.034.000</i>	<i>180.366.154.000</i>	<i>180.366.154.000</i>
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	72.169.950.810	79.582.505.311	99.057.505.311
4.2.02.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>72.169.950.810</i>	<i>79.582.505.311</i>	<i>79.582.505.311</i>
4.2.02.02	<i>Bankek Khusus dari Provinsi</i>	-	-	19.475.000.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.120.900.000	40.833.293.500	40.833.293.500
4.3.01	Pendapatan Hibah	43.120.900.000	40.833.293.500	40.833.293.500
5	BELANJA	1.925.719.234.701	1.740.534.272.712	1.821.363.777.051
5.1.	BELANJA OPERASI	1.197.174.516.432	1.249.662.956.739	1.286.928.332.523
5.1.01	Belanja Pegawai	661.675.392.221	571.322.875.061	596.322.875.061
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.443.256.692	587.442.915.795	599.708.291.579
5.1.03	Belanja Bunga	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	80.614.132.519	84.926.751.183	84.926.751.183
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.441.735.000	970.414.700	970.414.700
5.2.	BELANJA MODAL	430.181.449.168	219.204.968.669	262.769.097.224
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.876.500.000	1.902.150.000	1.902.150.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.459.563.038	48.674.106.162	48.674.106.162
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.235.255.486	49.659.282.852	76.964.164.238,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.169.491.938	116.902.604.655	133.161.851.824
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.519.196	2.066.825.000	2.066.825.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	20.107.119.510		
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER	296.863.269.101	268.666.347.304	268.666.347.304
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.457.956.693	4.342.922.404	4.342.922.404
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	292.405.312.408	264.323.424.900	264.323.424.900
	Surplus/Defisit	- 24.500.000.000	17.771.250.000	- 43.583.254.339
6	PEMBIAYAAN	24.500.000.000	- 17.771.250.000	43.583.254.339
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.000.000.000	135.228.750.000	196.583.254.339
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	10.228.750.000	71.583.254.339
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	96.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	96.500.000.000	153.000.000.000	153.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000		
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	95.000.000.000	153.000.000.000	153.000.000.000
	Pembiayaan Netto	24.500.000.000	- 17.771.250.000	43.583.254.339
	SILPA	0	-	0

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026, maka Tujuan dan Sasaran pembangunan pada perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2022 disinkronkan/diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada target kinerja pembangunan pada tahun 2022.

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2022 memuat langkah-langkah untuk mendukung **"Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan"**

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2021-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dengan Melaksanakan Nilai-Nilai Agama, Budaya, Persatuan, Kesatuan, Dan Norma Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang berbudaya	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu dan berwawasan kebangsaan
		Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal Dan Investasi	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya laju PDRB disetiap sektor
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah
		Meningkatnya status kemajuan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing
			Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PPKS
4	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan
5	Mengelola Dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 juga diselaraskan dengan tema RKP Tahun 2022 yakni "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yakni dengan membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, yakni dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, yakni dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).
4. Penyederhanaan Birokrasi, yakni dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, yakni dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembangunan daerah pada tahun 2022 juga diselaraskan dengan 3 prioritas pembangunan daerah Kalimantan Barat (sebagaimana Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023), yaitu:

1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung perekonomian.
3. Penyederhanaan birokrasi dan transformasi pelayanan publik.

Adapun tahapan pembangunan provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah Tahap Penguatan (Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Mengurangi Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan memperhatikan isu strategis daerah serta kondisi dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Sambas, maka tema pembangunan

daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2022 adalah "***Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Sambas yang Maju dan Unggul di Kalimantan Barat***", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi daerah melalui pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program ***Pengembangan OVOP*** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
 - Program ***RUSIMAH*** (Pengurusan Ijin di Rumah).
 - Program Tema ***SIPINDU*** (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu).
 - Program ***Green Growth*** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program ***Pelayan diktan*** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan).
 - Program ***Pemuda Siap Kerja***
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program ***PasminumMas*** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program ***E-Government***
5. Pemantapan kondisi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran hukum, penanggulangan bencana dan peningkatan wawasan kebangsaan; yang diselaraskan dengan program unggulan KDH terpilih yaitu :
 - Program ***BENTUK IMAN*** (Pembentukan insan madani)

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 dimaksud dijabarkan ke dalam tabel-tabel sebagai berikut :

TABEL 4.2
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
PENDIDIKAN			
~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar 15% APK Paud 45,20% APK SD/MI/Paket A 104,67% APK SMP/MTs/Paket B 99,57% APM PAUD APM SD/MI/Paket A 91,97% APMSMP/MTs/Paket B 75,67% APS PAUD APS SD/MI/Paket A 95,30% APS SMP/	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 98,92% APS SMP/MTs/Paket C 92,80% APS SD/MI/Paket A 104,67% APS SD/MI/Paket A 91,97% APS SD/MI/Paket A 95,30% APS SD/MI 0,34% APM SMP/MTs/Paket B 75,67% APS SMP/MTs 0,65% Angka Kelulusan (AL)	DIKBUD
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan 15 %	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan 15 %	DIKBUD
~ PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi 91,81%	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 85,60%	DIKBUD
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD
KESEHATAN			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80%	DINKES
~ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio ketersediaan Faskes 80% Persentase indikator SPM yang memenuhi target 100% Prevalensi Stunting (anak) 22,23% Cakupan kepesertaan JKN 65% Prevalensi Penyakit Menular 80% Prevalensi Penyakit Tidak Menular 100% Indeks kepuasan masyarakat 80%	Rasio ketersediaan Faskes 81% persentase indikator SPM yang memenuhi target 100% Prevalensi Stunting (balita) 16% Cakupan kepesertaan JKN 65% Prevalensi Penyakit Menular 79% Prevalensi Penyakit Tidak Menular 100% Indeks kepuasan masyarakat 85%	DINKES
~ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) 90% cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan 80% % perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes) 90%	% FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) 92% cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan 85% % perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes) 91%	DINKES
~ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk 90% Cakupan perijinan sarana kefarmasian 60%	Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk 91% Cakupan perijinan sarana kefarmasian 65%	DINKES

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase desa siaga aktif 70% Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM 90% Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat 100%	Persentase desa siaga aktif 72% Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM 91% Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat 55%	DINKES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
~ PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik 51,08km	PERKIM LH
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang 100%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW 50%	PU PR
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan 100 %	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap 0.6584 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk 0.001668072	PU PR
~ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 100%	Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan 10/99 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 220 Rekomendasi Teknis	PU PR
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%	PU PR
~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses Sanitasi Layak menjadi 81,93% dan di dalamnya 0,1% Sanitasi Aman	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi yang Layak 82,66%	PERKIM LH
~ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 100%	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya 10/99	PU PR
~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak 58,78%	PERKIM LH
~ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air 100 %	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 76,00%	PU PR
~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota menjadi 14,61% dan berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 0,05%	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase 14,83%	PERKIM LH
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
~ PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Jumlah Durasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kawasan Permukiman Antara Pusat, Provinsi dan Daerah yang di laksanakan - Persentase Jumlah Unit Rumah MBR yang diberikan Bantuan Material di Kawasan Permukiman (DAK)	- Jumlah unit peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera 191	PERKIM LH

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah unit peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR 191	PERKIM LH
~ PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan	Jumlah unit pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Kabupaten Kota 33	PERKIM LH
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (100%) Persentase PNS pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standar (80%) Persentase dokumen laporan kepegawaian yang sesuai pedoman (100%) Persentase dokumen laporan pengelolaan ke	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (100%) Persentase PNS pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standar (80%) Persentase dokumen laporan kepegawaian yang sesuai pedoman (100%) Persentase dokumen laporan pengelolaan ke	PERKIM LH
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun	BPBD
~ PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 75%, 2. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100%, 3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 75%, 4. Rasio Linmas 56 orang, 5. Rasio Siskamling Perdesa 2 Pos.	1. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan 80%, 2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 75%, 3. Persentase Penegakan PERDA/PERKADA 65%	SATPOL PP
~ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Kejadian Bencana - 100%	Persentase Penanganan Kejadian Bencana - 100%	BPBD
~ PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Sambas - 100%	1. Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota 70% 2. Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota 70%	BPBD
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan satuan Polisi Pamong Praja 5 orang	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan satuan Polisi Pamong Praja 5 orang	SATPOL PP
SOSIAL			
~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial (50 %)	- Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 60% - Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial (60%) - Persentase panti sosial yang mener	DINSOS PMD
~ PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana (100 %)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100%	DINSOS PMD
~ PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten dalam keadaan baik dan terawat (1 TMP)	Persentase pengelolaan Taman Makan Pahlawan 100%	DINSOS PMD

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (100 %)	Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (100 %)	DINSOS PMD
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten (100 %)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten (100 %)	DINSOS PMD
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil (10 %)	Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil (20 %)	DINSOS PMD
~ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) rehabilitasi sosial urusan SPM kewenangan Kabupaten dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti (50 %)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100%	DINSOS PMD
TENAGA KERJA			
~ PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) (1%) - Persentase Penyelesaian Perselisihan HI	-Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS, Bipatrit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 30,49%	NAKERTRANS
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayan/ Administrasi Perkantoran 1 Tahun	Meningkatnya Pelayan/ Administrasi Perkantoran 1 Tahun	NAKERTRANS
~ PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Vokasi (0,65%)	- Persentase Pekerja yang ditingkatkan Produktivitasnya (0,03%) -Persentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SMP, SMA(25%) - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 60%	NAKERTRANS
~ PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Penduduk Usia Kerja Yang ditempatkan	- Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan 50% -Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme antar kerja 0,23% - Persentase Angkatan Kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja 0,01%	NAKERTRANS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
~ PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Skor Indikator klaster 5 (perlindungan khusus anak) (75 poin)	Nilai Bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak (75)	DP3AP2KB
~ PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Indikator klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) (185)	-Nilai bobot klaster I sampai kalster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak (185)	DP3AP2KB

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak (100)	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak (100%)	DP3AP2KB
~ PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio penanganan perempuan korban KDRT (100%)	Partisipasi angkatan kerja perempuan(63,5%)	DP3AP2KB
~ PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio penanganan kekerasan Terhadap Perempuan (100%)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (100%)	DP3AP2KB
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (100%)	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (100%)	DP3AP2KB
~ PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD Yang melaksanakan ARG/PPRG (60%)	Persentase ARG pada belanja operasional APBD (60%)	DP3AP2KB
PANGAN			
~ PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan harapan	-Konsumsi Protein Penduduk 56.1 Gr.Prot/Kap/Hr - Konsumsi Energi Penduduk 1.857 Kkal/Kap/Hr - Jumlah Ketersediaan Protein 78.7 Gr.Prot/Kap/Hr -Jumlah ketersediaan Energi 3.054 Kkal/Kap/Hr - Konsumsi Beras Penduduk 93,4Kg/Kap/Thn -Penguatan Cadangan Pangan	PERTANIAN
~ PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah atau Desa Rawan Pangan 19%	Tingkat Kerawanan Pangan 16%	PERTANIAN
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 %	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 %	PERTANIAN
~ PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85%	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 80	PERTANIAN
~ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAEKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten 78,72	PERTANIAN
PERTANAHAN			
~ PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Masalah Pertanahan yang ada di Kabupaten Sambas antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 100%	PERKIM LH
~ PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Jumlah Luas Lahan yang dilakukan Penilaian Harga	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Peggunaan Tanah dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 100%	PERKIM LH
LINGKUNGAN HIDUP			

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas (%) 100%	PERKIM LH
~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 100%	Persentase Pelayanan Persampahan 44%	PERKIM LH
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan 6.70%	PERKIM LH
~ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keaneekaragaman hayati 100%	Persentase Kesesuaian Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati 100%	BAPPEDA
~ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati 100%	-Persentase kesesuaian program Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola 100% -Jumlah lokasi lahan keaneekaragaman Hayati yang Dikelola 1	PERKIM LH
~ PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola (Ha) 210 -Jumlah DAS yang dipantau 4 - Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan) 1 - Jumlah Kampung Iklim yang masuk dalam sistem Registrasi Nasional (Desa) 12	PERKIM LH
~ PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup	PERKIM LH
~ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau kerusakan LH 100%	PERKIM LH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target : 99,90%	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target : 99,90%	CAPIL

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) target: 100% 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak(KIA) target: 35% 3. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) target: 100%	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) target: 100% 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak(KIA) target: 56% 3. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) target: 99,3%	CAPIL
~ PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase bayi berakta kelahiran target: 86% 2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18) tahun; target: 95% 3. Persentase Kepemilikan akta kelahiran; target: 50% 4. Persentase kepemilikan akta perkawinan; target: 18,50% 5.Pers	1. Persentase bayi berakta kelahiran target: 86% 2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18) tahun; target: 95% 3. Persentase Kepemilikan akta kelahiran; target: 50% 4. Persentase kepemilikan akta perkawinan; target: 18,50% 5.Pers	CAPIL
~ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan target: 99,90% 2. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah target: 17,50% 3. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan P	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah target: 17,50% 2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20,00% 3. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	CAPIL
~ PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan target: 99,90%	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan target: 99,90%	CAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
~ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase pengukuran IDM dan Evaluasi Perkembangan Desa (100 %) 2. Persentase penetapan batas desa dengan Keputusan Kepala Daerah (50 %) 3. Persentase BUM Desa yang terbentuk (75 %)	1. Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) (100 %) 2. Persentase penetapan dan penegasan batas desa (50 %) 3. Persentase Desa yang memiliki BUM Desa terdaftar dan berbadan hukum (75 %)	DINSOS PMD
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DANMASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan (30 %)	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (36) 2. Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan (30%) 3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (6) 4. Persen	DINSOS PMD

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang tertata (100 %)	1. Persentase Penataan Desa 100% 2. Cakupan Sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik 100%	DINSOS PMD
~ PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa (50 %) 2. Persentase kawasan perdesaan yang dikembangkan	1. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa (20 %) 2. Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan (100%)	DINSOS PMD
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
~ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian penduduk (4 dokumen)	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 3,70	DP3AP2KB
~ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB (19 kec)	Rasio Akseptor KB 87,66%	DP3AP2KB
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga (4.544 orang)	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga 19,2%	DP3AP2KB
PERHUBUNGAN			
~ PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (12 kegiatan)	DISHUB
~ PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Penerbangan dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional	100.000.000	DISHUB
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terselenggarannya Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan Kabupaten	1. Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Jumlah penetapan rencan	DISHUB
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	DISHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
~ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terselenggaranya optimalisasi Pengelolaan pelayanan informasi publik dan terlaksananya Diseminasi Informasi secara menyeluruh di Kabupaten Sambas 19 Kecamatan	Persentase pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan desiminasi informasi yang telah dilakukan pemda untuk masyarakat Kab. Sambas (100%)	KOMINFO
~ PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Sistem Informasi Elektronik (e-Gov) yang dapat diakses oleh semua OPD 12 bulan	Cakupan Layanan Telekomunikasi (75%)	KOMINFO
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penyusunan rencana kerja OPD yang memadai setiap tahunnya 77%	Persentase terpenuhinya penyusunan rencana kerja OPD yang memadai setiap tahunnya 77%	KOMINFO

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
~ PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 23,8%	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 30,76%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan 14,81%	Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan 23,22%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro naik kelas 8 Unit	Rasio Wirusaha berskala mikro naik kelas 0,47%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha 8,68%	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha 8,68%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 1,45%	Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 4,98%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPANPINJAM	Persentase pelayanan izin KSP/USP 12 %	Persentase pelayanan izin KSP/USP 15,90%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan pemerintah daerah 100%	Persentase pelayanan pemerintah daerah 100%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi 10,68%	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi 9,95%	PERINDAGKOP
PENANAMAN MODAL			
~ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Target Sangat Baik	Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Target Sangat Baik	PTSP
~ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Di Kabupaten Sambas, Target PMA = 7.625.324.168.000,-; PMDN = 6.188.402.000.000,-; Total = 13.813.726.168.000,-.	Nilai Investasi Di Kabupaten Sambas, Target PMA = 7.701.186.888.984,-; PMDN = 7.877.559.498.531,-; Total = 15.578.746.387.516,-.	PTSP
~ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang Berinvestasi Di Kabupaten Sambas, Target 61 Investor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun (100%)	PTSP
~ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang Berinvestasi Di Kabupaten Sambas, Target 61 Investor	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Kabupaten Sambas (82)	PTSP
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Hasil Evaluasi PMPRB, Target 82,00% Persentase Peningkatan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD, Target 82,00%	Persentase Peningkatan Hasil Evaluasi PMPRB, Target 82,00% Persentase Peningkatan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD, Target 82,00%	PTSP
~ PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Di Kabupaten Sambas, Target PMA = 7.625.324.168.000,-; PMDN = 6.188.402.000.000,-; Total = 13.813.726.168.000,-.	Cakupan data dan informasi penanaman modal (100%)	PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten / kota = 2,82%	Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten / kota = 1,94%	DISPARPORA
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan = 30	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan = 34,38%	DISPARPORA
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan = 3,51%	Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan = 50%	DISPARPORA
STATISTIK			
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksananya kegiatan Statistik Sektoral di Kabupaten Sambas 12 bulan	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi 100%	KOMINFO
PERSANDIAN			
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya Kegiatan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Kabupaten Sambas 100%	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat	KOMINFO
KEBUDAYAAN			
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang dilestarikan 15%	Persentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan 60%	DIKBUD
~ PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Pemanfaatan Museum daerah 100%	Jumlah Kunjungan Museum (1360)	DIKBUD
~ PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan 60%	- Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi (52 buah) - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan (2 buah) - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (42.25)	DIKBUD
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang dilestarikan 15%	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi 40.00	DIKBUD
PERPUSTAKAAN			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan	PERPUS ARDA
~ PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.Persentase Perpustakaan yang berkembang.2. Jumlah Rata-rata kunjungan perpustakaan daerah per tahun	1.Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (2.8) 2. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk (0.00056)	PERPUS ARDA
~ PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Koleksi Budaya dan Naskah kuno yang dilestarikan	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (10)	PERPUS ARDA
KEARSIPAN			

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku (56%) 2. Tingkat ketersediaan arsip (30)	PERPUS ARDA
~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase arsip yang terjaga kelestariannya.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban (30)	PERPUS ARDA
~ PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi.	Persentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi (90)	PERPUS ARDA
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100%	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100%	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (21.900 Ton)	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) (1.930 Ton)	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah POKMASWAS yang dibina (3POKMASWAS/Tahun)	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan (167 Ton)	P2 KESWAN
PARIWISATA			
~ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata = 20,88	Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata = 11,36%	DISPARPORA
~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata = 0,77% Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif = 1,95%	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata = 0,77% Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif = 1,95%	DISPARPORA
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran = 80% Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan = 100% (tepat waktu) Ketersediaan dokumen perencanaan = 100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran = 80% Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan = 100% (tepat waktu) Ketersediaan dokumen perencanaan = 100%	DISPARPORA
~ PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 5,88%	DISPARPORA
~ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lingkup pemasaran pariwisata daerah = 40%	Lingkup pemasaran pariwisata daerah = 60%	DISPARPORA
PERTANIAN			

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%) (60%)	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penerapan Inovasi Teknologi 27.70%	Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang (2 unit tumbuh dan 1 pengembangan)	PERTANIAN
~ PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terlaksananya penerapan perizinan usaha pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha/NIB) 100%	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan = 95%, Hortikultura = 90 - 95%, Perkebunan = 80%)	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (1.66)	PERTANIAN
~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya dan bertambahnya Prasarana pertanian	1. Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk) (4%) 2. Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet) (3.00%) 3. Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi) (2.00%)	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali	Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali (71.9)	PERTANIAN
~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya dan bertambahnya Sarana pertanian	Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan (20%)	P2 KESWAN
~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan 97,57, Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura 2%, Persentase Peningkatan Luas Panen Perkebunan 2%	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) (3590790)	PERTANIAN
~ PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan 10%	1. Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (2.8) 2. Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha/NIB) 100%	PERTANIAN
PERDAGANGAN			
~ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah nilai ekspor per tahun Rp 10.311.925.284	Jumlah nilai ekspor per tahun Rp 10.311.925.284	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 54%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 54,64%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 96,55%	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 96,55%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 65,93%	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 66,24%	PERINDAGKOP

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas 7 %	Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas 5 % dari 65% keseluruhan didapat 7%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefesien variasi harga Perkomoditas bahan pokok antar waktu perkomoditas bahan pokok (daging ayam, telur, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu) < 9%	Persentase Koefesien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok (a. Beras; b. Tepung Terigu; c. Telur; d. Daging Ayam; e. Gula Pasir; f. Minyak Goreng) < 9%	PERINDAGKOP
PERINDUSTRIAN			
~ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase Pembinaan IKM 14,69%	persentase Pembinaan IKM 14,69%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten 21,28%	Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten 18,83%	PERINDAGKOP
~ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke siinas 5,91%	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke siinas 5,23%	PERINDAGKOP
TRANSMIGRASI			
~ PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Dokumen Hak Pengelolaan (HPL) yang diproses. (3,03%)	Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan	NAKERTRANS
~ PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penataan Transmigran yang ditempatkan (32%)	Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan (20%)	NAKERTRANS
~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Warga Transmigrasi yang dibina (23%)	Presentase kk Transmigrasi yang dibina (17,5%)	NAKERTRANS
SEKRETARIAT DAERAH			
~ PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%) Persentase OPD Dengan Nilai SAKIP B (100%) Persentase PD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi (100%)	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%) Persentase OPD Dengan Nilai SAKIP B (100%) Persentase PD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi (100%) Indeks Kepuasan Masyarakat (80%) Pers	SETDA
~ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku (100%) Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (100%)	persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku (100%) Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (100%)	SETDA
~ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan bidang hukum (100%)	Cakupan pelayanan bidang hukum (100%)	SETDA

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel (100%)Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian dan SDA (100%)Cakupan Implementasi pembangunan daerah (100%)	Cakupan Pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel (100%)Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian dan SDA (100%)Cakupan Implementasi pembangunan daerah (100%)	SETDA
SEKRETARIAT DPRD			
~ PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi umum SKPD (akuntabel dan tepat waktu)	Cakupan pelayanan administrasi umum SKPD (akuntabel dan tepat waktu) 100	SET DPRD
~ PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Tugas DPRD	- Persentase Raperda yang disetujui menjadi perda (80) -Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran (100) -Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran (92) -Persentase peningkatan kapasitas DPRD (90)	SET DPRD
PERENCANAAN			
~ PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah 100%	Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 100%	BAPPEDA
~ PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta bidang infrastruktur dan kewilayahan 100%	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPd dan Program RKPd kedalam APBD 100%	BAPPEDA
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100%	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100%	BAPPEDA
KEUANGAN			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten 100%	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten 100%	BAKUDA
~ PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu 100%	Persentase dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan 100%	BAKUDA
~ PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kinerja pengelolaan barang milik daerah 100%	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan 100%	BAKUDA
~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kinerja pengelolaan pendapatan daerah 100%	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah 100%	BAKUDA

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
KEPEGAWAIAN			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah 80,50 (A) Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah 95% Indek kepuasan masyarakat 84% (B)	Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah 80,50 (A) Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah 95% Indek kepuasan masyarakat 84% (B)	BKPSDM
~ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Penerapan Sistem Merit 175 (Kategori II) Tingkat Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah 61%	-Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin 82% -Persentase keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK 100%	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tingkat profesionalitas ASN 61%	-Rata-rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional 46%	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
~ PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan 100%	Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan 100%	BAPPEDA
PENGLOLAAN PERBATASAN			
~ PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Cakupan Implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan (100%)	Cakupan Implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan (100%)	SETDA
INSPEKTORAT DAERAH			
~ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas APIP (Level 2,6) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah (Level 2,7) Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko (32%) Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi (32%) Persentase Pe	-Tingkat Kapabilitas APIP (Level 2,6) -Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Level 2,7) -Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko (32%) -Persent	INSPEKTORAT
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kapabilitas APIP (Level 2,6) Terselenggaranya kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pengawasan (12 Bulan)	Tingkat Kapabilitas APIP (Level 2,6) Terselenggaranya kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pengawasan (12 Bulan)	INSPEKTORAT
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Kapabilitas APIP (Level 2,6) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah (Level 2,7) Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB (34%) Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan	-Tingkat Kapabilitas APIP (Level 2,6) -Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Level 2,7) -Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB (34%) -P	INSPEKTORAT
KECAMATAN			

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan serta Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi baik	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SEJANGKUNG (12)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.TEBAS (23)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SELAKAU TIMUR (4)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SEBAWI (7)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.PEMANGKAT (8)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.PALOH (8)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik 100% (8 Desa)	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.TANGARAN (8)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SUBAH (11)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.GALING (10)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 76,92%	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.JAWAI (13)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM 100%	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SAJAD (4)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SALATIGA (5)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.TEKARANG (7)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sakip Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SEMPARUK (5)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.TELUK KERAMAT
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SEMPARUK (5)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SAJINGAN BESAR (5)

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.JAWAI SELATAN (9)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.TEKARANG (7)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.TEBAS (23)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SELAKAU TIMUR (4)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SEBAWI (7)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan 10 kegiatan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.JAWAI (13)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.GALING (10)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.PEMANGKAT (8)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlakannya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN 100%	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SAJAD (4)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SEJANGKUNG (12)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sakip Kecamatan dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.JAWAI SELATAN (9)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI SAKIP KECAMATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SELAKAU (11)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI SAKIP KECAMATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SAMBAS (18)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sakip Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.TELUK KERAMAT
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sakip Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SUBAH (11)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SAJINGAN BESAR (5)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SALATIGA (5)

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 80%	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.TANGARAN (8)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SAJINGAN BESAR (5)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SALATIGA (5)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Nilai Sakip Kecamatan BB; 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BB	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.JAWAI (13)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.TEKARANG (7)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100%	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SAJAD (4)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.TELUK KERAMAT
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SEMPARUK (5)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SELAKAU (11)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SEJANGKUNG (12)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SAMBAS (18)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.SAJINGAN BESAR (5)
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi baik	Persentase Desa Dengan Tata Kelola dan Administrasi yang Baik 70%	KC.JAWAI SELATAN (9)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.PEMANGKAT (8)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		KC.SEMPARUK (5)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.PALOH (8)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.PEMANGKAT (8)

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan dan Persentase lembaga masyarakat yang dibina	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.JAWAI SELATAN (9)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		KC.SELAKAU (11)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan		KC.JAWAI SELATAN (9)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Teselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah		KC.SALATIGA (5)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya URUSAN PEMERINTAHAN 100%		KC.SAJAD (4)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		KC.SEJANGKUNG (12)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pelayanan Publik		KC.SAJINGAN BESAR (5)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SELAKAU TIMUR (4)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100%		KC.JAWAI (13)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.SEBAWI (7)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan		KC.SAMBAS (18)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.TELUK KERAMAT
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.TEKARANG (7)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.TEBAS (23)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.SUBAH (11)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.SELAKAU TIMUR (4)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.SEBAWI (7)

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.PEMANGKAT (8)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.PALOH (8)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KC.GALING (10)
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 80%Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100%Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100%		KC.TANGARAN (8)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SELAKAU TIMUR (4)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 75% (meningkat)	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.TANGARAN (8)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SUBAH (11)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SELAKAU (11)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.SAMBAS (18)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Peningkatan Jumlah Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 8-10 kali	KC.GALING (10)
~ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Kasus Pelanggaran Trantib dan Pekat 60% (menurun)	Penurunan Kasus Pelanggaran Trantib dan Pekat 60% (menurun)	KC.TANGARAN (8)
~ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Kasus Pelanggaran Trantib dan Pekat 12 kasus	Penurunan Kasus Pelanggaran Trantib dan Pekat 12 kasus	KC.JAWAI (13)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN 100%	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SAJAD (4)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SALATIGA (5)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SEMPARUK (5)

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan 50 peserta; 2. Persentase Lembaga Masyarakat yang Dibina 100%	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.JAWAI (13)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.GALING (10)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.TEKARANG (7)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.PALOH (8)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SEBAWI (7)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SUBAH (11)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.TELUK KERAMAT
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan lembaga masyarakat yang dibina	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SAMBAS (18)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan lembaga masyarakat yang dibina	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SELAKAU (11)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan 95% Persentase lembaga masyarakat yang dibina 85%	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.TANGARAN (8)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.PALOH (8)
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.TEBAS (23)
~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terselesaikan ditingkat kecamatan 100%	KC.TEBAS (23)

PROG PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET	PD
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada pembangunan dan Persentase lembaga masyarakat yang dibina	-Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) -Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina (100%)	KC.SEJANGKUNG (12)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan Keuangan perangkat daerah (95%)	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan Keuangan perangkat daerah (95%)	KESBANGPOL
~ PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini (85%)	Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat (100%)	KESBANGPOL
~ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (85%)	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah 95%	KESBANGPOL
~ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Pendidikan Politik (70%)	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis 100%	KESBANGPOL
~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terbina (90%)	Persentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi (70%)	KESBANGPOL
~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa (85%)	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat (85%)	KESBANGPOL

Tabel 4.3
Target Indikator Kinerja Utama Perubahan RKPD
Kabupaten Sambas Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target (2022)	Target Perubahan (2022)
1.	Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	%	67,40	-
2.	Persentase konektivitas antar desa	%	96,05	-
3.	Persentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	%	-	69,25
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	3,35 – 4.63	3,35 - 4,63
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	68,65 – 69,07	68,46 - 68,66
6.	Angka Kemiskinan	%	7,58 – 7,16	7,58 - 7,16
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,42 – 3,12	3,42 – 3,12
8.	Capaian Status Kemajuan Desa Mandiri	Jumlah Desa	56	80
9.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil Evaluasi AKIP)	Opini	BB	BB
10.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	WTP
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	BB	BB
12.	Indeks Lingkungan Hidup	%	70,30	65,50

Tabel 4.4
Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.65	13.21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6.94	7.41
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	104.67 %	100 %
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	91.97 %	92.72 %
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	95.30 %	99.37 %
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,34 %	0,27 %
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	99.57 %	99.95 %
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	75.67 %	82.15 %
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C	92.80 %	96.77 %
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.65 %	0.30 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	60.25 %	65.28 %
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	560	580
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.85 %	99.97 %
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.92 %	99.15 %
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90.4 %	90.85 %
Angka Partisipasi Kasar Paud	60.52 %	62.08 %
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.83 %	99.95 %
Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	15 %	20,05 %
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	85.60 %	92.58 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Angka Harapan Hidup (AHH)	74.17 Tahun	74.84 Tahun
Rasio ketersediaan Faskes	81 %	85 %
Persentase indikator SPM yang memenuhi target	100 %	100 %
Prevalensi Stunting (Balita)	16 %	13 %
Cakupan kepesertaan JKN	65 %	100 %
Prevalensi Penyakit Menular	79 %	77 %
Prevalensi Penyakit Tidak Menular	100 %	100 %
Indeks kepuasan masyarakat	85 %	100 %
Persentase FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes)	92 %	96 %
Cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan	85 %	100 %
Persentase perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes)	91 %	95 %
Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk	91 %	95 %
Cakupan perijinan sarana kefarmasian	65 %	85 %
Persentase desa siaga aktif	72 %	78 %
Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM	91 %	95 %
Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	55 %	89 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	68.62 %	78.78 %
Persentase Jalan Poros Desa dalam kondisi mantap	61.60 %	68.50 %
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW	100	100
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi	76,00 %	76,89 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Baik		
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Layak	58,78 %	72,74 %
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	82.66 %	85.58 %
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	14.83 %	15.71 %
Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	38,69 km	58,69 km
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	220 Reko mendasi Teknis	270 Reko mendasi Teknis
Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan	10/99	12/99
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10/99	10/99
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	0.6584	0.7471
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0.001668 072	0.001515 918
Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	15	60
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW	50 %	65 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80.29	80.50
Jumlah Unit Pembangunan dan rehabilitasi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33	122
Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera	191 Unit	591 Unit
Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR	191 Unit	591 Unit
Persentase Penyediaan PSU diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	2 %	10 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Tingkat Kesadaran Hukum dan Trantib	68.33	82.67
INDEKS RESIKO BENCANA	163,59 indeks	139,05 indeks
Indeks Ketahanan Daerah	0.59	0.68
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	75 %	85 %
Persentase Penegakan PERDA/PERKADA	60 %	73 %
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	70 %	90 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
(Linmas)		
Persentase Penanganan Kejadian Bencana	100 %	100 %
Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota	70 %	85 %
Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota	70 %	85 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Indeks Kerukunan Sosial	79,77	88,55
Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil	20 %	60 %
Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100 %	100 %
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	60 %	100 %
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60 %	100 %
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60 %	100 %
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %
Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.65	74.81
Persentase Lapangan Usaha atau Bidang Pekerjaan Utama yang menjadi Sektor Pilihan dalam Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	11,11	55,56
Persentase Perusahaan Besar yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	0 %	1,33 %
Persentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya	0,03 %	0,23 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Persentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA.	25 %	33,33 %
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	60 %	80 %
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Antar Kerja	0,23 %	2,11 %
Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	0,01 %	0,01 %
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50 %	70 %
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatrit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30,49 %	31,92 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.26	73.26
Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	300	570
Persentase ARG pada belanja Operasional APBD	60 %	100 %
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %
Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,5 %	65,5 %
Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100 %	100 %
Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	185	290
Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	75	110
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	55,17	60,91
Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten	78.72	80
Konsumsi Energi Penduduk	1.857 Kkal/Kap/Hr	1.958 Kkal/Kap/Hr
Konsumsi Protein Penduduk	56,1 Gr.P rot/Kap/ Hr	57,0 Gr.P rot/Kap/ Hr
Konsumsi Beras Penduduk	93,4 Kg/Kap/Thn	92,9 Kg/Kap/Thn
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	40 %	40 %
Jumlah Ketersediaan Energi	3.054 Kkal/Kap/Hr	3.226 Kkal/Kap/Hr
Jumlah Ketersediaan Protein	78,7 Gr.P rot/Kap/ Hr	80,5 Gr.P rot/Kap/ Hr
Tingkat Kerawanan Pangan	16 %	12 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	80 %	90 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %
Tersedianya jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah	1 dokum en	1 dokum en
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Indeks kualitas air	51,10	51,50
Indeks kualitas udara	90,15	90,40
Indeks kualitas lahan	40,15	40,19
Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup	0 dokum en	1 dokum en
Jumlah DAS yang Dipantau	4	4
Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan)	1	1
Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola	210 Ha	550 Ha
Jumlah Kampung Iklim yang Masuk Dalam Sistem Registrasi Nasional	12 Desa	24 Desa
Jumlah Lokasi Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Lokasi	2 Lokasi
Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati	100 %	100 %
Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas	100 %	100 %
Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	6,70 %	9,70 %
Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100 %	100 %
Persentase Pelayanan Persampahan	44 %	72 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Adminduk	84.20	85.00
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56 %	68 %
Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	99.3 %	99,7 %
Persentase Bayi Berakta Kelahiran	86 %	92 %
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	95 %	99 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Usia 0 - 18 Tahun		
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	50 %	58 %
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	18,50 %	23 %
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	13 %	20 %
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	12 %	16 %
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,90 %	99,90 %
Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	17,50 %	20 %
Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 %	20 %
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20 %	20 %
Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20 %	20 %
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	99,90 %	99,90 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Persentase Peningkatan Status Desa	41.03 %	71.79 %
Persentase penataan desa	100 %	100 %
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	20 %	60 %
Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan	100 %	100 %
Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)	100 %	100 %
Persentase penetapan dan penegasan batas desa	50 %	100 %
Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum	75 %	100 %
Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan	30 %	70 %
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	6	6
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	36	40
Persentase PKK aktif	100 %	100 %
Persentase posyandu aktif	100 %	100 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	57.90	61.90
Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,70	3,50
Rasio Akseptor KB	87,66 %	90,28 %
Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	19,2 %	96,15 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	63.56	71.51
Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3 unit	3 unit
Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3 paket	3 paket
Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 dokum en	7 dokum en
Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 tahun	1 tahun
Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 kegiat an	14 kegiat an
Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 kegiatan	1 kegiatan
Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit
Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Kegiat an	12 Kegiat an
Tersedianya Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	65	85
Tingkat keterbukaan informasi publik	90	100
Cakupan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Terlaksananya Desiminasi informasi secara Menyeluruh Dikabupaten Sambas	100 %	100 %
Cakupan Layanan Telekomunikasi	75 %	95 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Persentase Koperasi Yang Berkualitas	25,48 %	32,80 %
Rasio Kewirausahaan	2,997	3,006
Persentase pelayanan izin KSP/USP	15,90 %	18,18 %
Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	4,98 %	7,14 %
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30,76 %	33,33 %
Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	23,22 %	74,45 %
Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	9,95 %	25,75 %
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	8,68 %	16,01 %
rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,47 %	0,91 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Perusahaan	1.50 %	3.43 %
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	82 %	111 %
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	100 %	100 %
Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik
Nilai Investasi di Kabupaten Sambas	15.578.74 6.387.516 Rp	22.808.8 42.585.9 62 Rp
Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Tingkat Prestasi Pemuda	3	6
Tingkat Prestasi Olah Raga	30	35
Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	1,94	2,19
Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	34,38 %	42,57 %
Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	50 %	50 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Tingkat Pemajuan Budaya	20,35	30,5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Cakupan Pemajuan Pengelolaan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah	25.50 %	35.00 %
Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	60 %	90 %
Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi	40 %	62.50 %
Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	12 %	23 %
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	45.25 %	60.75 %
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	2 Buah	10 Buah
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	52 Buah	63 Buah
Jumlah Kunjungan Museum	1360	2060
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Indeks Pembangunan Literasi	35	39
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.00056	0.00095
Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.8 %	5,6 %
Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan	10 %	50 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Tingkat Pengelolaan Arsip	55	72
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku	56 %	100 %
Tingkat Ketersediaan Arsip	30 %	70 %
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	30 %	80 %
Persentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi	90 %	95 %
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.900 To n	22.160 T on
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.930 To n	2.750 To n
Jumlah POKMASWAS yang Dibina	3 POKMA SWAS / Tahun	3 POKMA SWAS / Tahun
Jumlah Produksi Pengolahan	167 Ton	228 Ton
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Persentase peningkatan kunjungan wisata	4.33 %	9.97 %
Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata	11,36 %	25,76 %
Lingkup pemasaran pariwisata daerah	60 %	100 %
Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif	5,88 %	29,41 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	0,77 %	3,85 %
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1,95 %	9,77 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	3,9	5,9
Jumlah Populasi Ternak	3.590.790 Ekor	3.788.638 Ekor
Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi)	2 %	3 %
Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk)	4 %	4 %
Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet)	3 %	3 %
Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan	20 %	20 %
Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali	71.9 %	76.53 %
Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	60 %	60 %
Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1,66 %	6,92 %
Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB)	100 %	100 %
Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan	2,8 %	8,5 %
Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang	2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan	2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.66 %	4.11 %
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	54,20 %	84,00 %
Persentase pengembangan dan pengeloaan sarana distribusi perdagangan	96,55 %	49,15 %
Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok (a. Beras; b. Tepung Terigu; C. Telur; d. Daging Ayam; e. Gula Pasir; f. Minyak Goreng)	<9 %	<9 %
Jumlah nilai ekspor non migas per tahun	10.311.925.284 Rp	15.097.689.808 Rp
Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,	66,24 %	74,52 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		
Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	2 %	3.55 %
persentase Pembinaan IKM	14,69 %	17,69 %
Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	18,83 %	24,51 %
Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas	5,23 %	12,25 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Persentase satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian	65 %	77 %
Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan	29,03 %	19,35 %
Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan	20 %	20 %
Persentase kk transmigran yang dibina	17,5 %	22,5 %
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
Tingkat kualitas hidup beragama	76	88
Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	100	100
Cakupan pelayanan bidang hukum	100 %	100 %
Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %
Persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %
Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	100 %	100 %
Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian SDA	100 %	100 %
Cakupan Implementasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	80 %	100 %
Persentase OPD yang menyediakan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 %	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	89 %
Persentase OPD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi	75 %	84,1 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	80 %	100 %
SEKRETARIAT DPRD		
Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	92	98
Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda	80 %	95 %
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	90 %	98 %
Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran	92 %	98 %
Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran	100 %	100 %
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
PERENCANAAN		
SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.24	25.04
SAKIP Komponen Capaian Kinerja	11,46	12,66
Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %
Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %
KEUANGAN		
Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	100	100
Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	100 %	100 %
Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	100 %
Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah	100 %	100 %
KEPEGAWAIAN		
Indeks Penerapan Sistem Merit	225	300
Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	82 %	90 %
Persentase Keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK	100 %	100 %
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Rata - rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	46 %	66 %
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %	100 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
Indeks Inovasi Daerah (IIDa)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	100 %	100 %
PENGELOLAAN PERBATASAN		
Cakupan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan	100 %	100 %
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH		
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2,7	3,1
Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Peran dan Layanan Pengawasan	Level 2,3	Level 2,7
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Assurance	2,7	3,1
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance	34 %	100 %
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance	34 %	100 %
Persentase Tindak Lanjut Temuan	85 %	85 %
Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	32 %	100 %
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Kabupaten Sambas	25 %	100 %
Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Praktik Profesional	Level 2,6	Level 3,0
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Konsultasi	Level 2,7	Level 3,1
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi	34 %	100 %
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi	34 %	100 %
Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	12 Bulan %	12 Bulan %
Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Pengelolaan SDM, Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas	Level 2,8	Level 3,2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah	
	Tahun 2022	Tahun 2026 (Kondisi Akhir RPJMD)
dan Manajemen Kinerja		
Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Inspektorat kabupaten Sambas	Ya	Ya
Penerapan Manajemen Resiko pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Ya	Ya
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Dimensi Budaya Organisasi Antikorupsi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas	Ya	Ya
UNSUR KEWILAYAHAN		
KECAMATAN		
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80.5-84.5 (B)	92.01- 94.00 (A)
Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %
Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina	100 %	100 %
Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	100 %	100 %
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %
Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	100 %	100 %
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Tingkat Kerukunan Hidup dan Wasbang	95	95
Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah	95 %	95 %
Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	100 %	100 %
Persentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	70 %	90 %
Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	85 %	85 %
Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	100 %	100 %

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun Rencana kerja dan pendanaan daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kab. Sambas Tahun 2022

**PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2022**

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
1.01 PENDIDIKAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.004.106.022,55	410.564.115.756,24		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	447.353.400,00	447.353.400,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	402.008.290.980,00	402.008.290.980,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.382.574.600,00	2.942.584.333,69		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.473.233.742,55	1.473.233.742,55		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.948.400,00	1.817.948.400,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.521.240.800,00	1.521.240.800,00		
					353.464.100,00	353.464.100,00		

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar 15% APK Paud 45,20% APK SD/MI/Paket A 104,67% APK SMP/MTs/Paket B 99,57% APM PAUD APM SD/MI/Paket A 91,97% APMSMP/MTs/Paket B 75,67% APS PAUD APS SD/MI/Paket A 95,30% APS SMP/	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 98,92% APS SMP/MTs/Paket C 92,80% APS SD/MI/Paket A 104,67% APS SD/MI/Paket A 91,97% APS SD/MI/Paket A 95,30% APS SD/MI 0,34% APM SMP/MTs/Paket B 75,67% APS SMP/MTs 0,65% Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,85% AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 90,4% APK Paud 60,52% AL SMP/MTs 99,83% APK SMP/MTs/Paket B 99,57% Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 560	56.604.334.900,00	57.164.344.633,69	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi SNP 15%	Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi SNP 15%	25.634.446.800,00	25.634.446.800,00	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP 22,15%	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP 22,15%	24.539.637.400,00	24.539.637.400,00	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang memenuhi SNP 15,20%	Persentase PAUD yang memenuhi SNP 15,20%	2.272.150.700,00	2.832.160.433,69	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Desa yang memiliki lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase pendidikan nonformal/kesetaraan yang terakreditasi 85%	Jumlah Desa yang memiliki lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase pendidikan nonformal/kesetaraan yang terakreditasi 85%	4.158.100.000,00	4.158.100.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan 15 %	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan 15 %	100.013.100,00	100.013.100,00	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan 1 dokumen	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan 1 dokumen	100.013.100,00	100.013.100,00	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi 91,81%	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 85,60%	4.367.070.000,00	4.367.070.000,00	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi 4300 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi 4300 Orang	4.367.070.000,00	4.367.070.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
2.22	KEBUDAYAAN							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang dilestarikan 15%	Persentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan 60%	57.201.100,00	57.201.100,00	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang dikelola oleh masyarakat 10 jenis	Jumlah Kebudayaan yang dikelola oleh masyarakat 10 jenis	57.201.100,00	57.201.100,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang dilestarikan 15%	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi 40.00	687.830.100,00	687.830.100,00	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang dilestarikan oleh masyarakat 12 jenis	Jumlah Kesenian yang dilestarikan oleh masyarakat 12 jenis	687.830.100,00	687.830.100,00	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan 60%	- Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi (52 buah) - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan (2 buah) - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (42.25)	500.000.000,00	500.000.000,00	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 41	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 41	500.000.000,00	500.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Pemanfaatan Museum daerah 100%	Jumlah Kunjungan Museum (1360)	685.800.300,00	685.800.300,00	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola 1 museum	Jumlah Museum yang dikelola 1 museum	685.800.300,00	685.800.300,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
DINAS KESEHATAN								
1.02 KESEHATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80%	104.113.217.424,65	104.113.217.424,65		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD 100%	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD 100%	550.000.000,00	550.000.000,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	96.838.217.424,65	96.838.217.424,65		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah 100%	Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah 100%	175.000.000,00	175.000.000,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%	jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%	330.000.000,00	330.000.000,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%	500.000.000,00	500.000.000,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang milik Daerah penunjang yang diadakan 100%	jumlah pengadaan Barang milik Daerah penunjang yang diadakan 100%	970.000.000,00	970.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor 100%	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor 100%	410.000.000,00	410.000.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dipelihara 100%	Tersedianya BMD yang dipelihara 100%	4.110.000.000,00	4.110.000.000,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	jumlah pelayanan BLUD 28 puskesmas, 2 rumah sakit	jumlah pelayanan BLUD 28 puskesmas, 2 rumah sakit	150.000.000,00	150.000.000,00		
	Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Terlaksananya penataan organisasi 100%	Terlaksananya penataan organisasi 100%	80.000.000,00	80.000.000,00		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio ketersediaan Faskes 80%Prosentase indikator SPM yang memenuhi target 100%Prevalensi Stunting (anak) 22,23%Cakupan kepesertaan JKN 65%Brevalensi Penyakit Menular 80%Brevalensi Penyakit Tidak Menular 100%Indeks kepuasan masyarakat 80%	Rasio ketersediaan Faskes 81%persentase indikator SPM yang memenuhi target 100%Prevalensi Stunting (balita) 16%Cakupan kepesertaan JKN 65%Brevalensi Penyakit Menular 79%Brevalensi Penyakit Tidak Menular 100%Indeks kepuasan masyarakat 85%	285.304.105.108,00	296.760.415.811,82		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	% Fasilitas Pelayanan UKM dan UKP dalam Kondisi BaikProsentase Ketersediaan obat dan BHP 100%	% Fasilitas Pelayanan UKM dan UKP dalam Kondisi BaikProsentase Ketersediaan obat dan BHP 100%	149.069.308.000,00	149.069.308.000,00		

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Capaian Indikator SPM (12 indikator spm)Cakupan UCIPersentase FKTP terakreditasi MadyaPersentase RSUD terakreditasi ParipurnaPrevalensi HIV per 100.000Prevalensi Malaria / 1000Cakupan Penduduk > 2 tahun minum obat FilariasisInsiden Rate DBD pe	<i>Jumlah Capaian Indikator SPM (12 indikator spm)Cakupan UCIPersentase FKTP terakreditasi MadyaPersentase RSUD terakreditasi ParipurnaPrevalensi HIV per 100.000Prevalensi Malaria / 1000Cakupan Penduduk > 2 tahun minum obat FilariasisInsiden Rate DBD pe</i>	135.629.797.108,00	147.086.107.811,82		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	% Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100%	<i>% Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100%</i>	155.000.000,00	155.000.000,00		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota</i>	Prosentase Faskes Rujukan dengan Tipe CCakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas KesehatanCakupan sistem pelayanan kesehatan rujukan	<i>Prosentase Faskes Rujukan dengan Tipe CCakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas KesehatanCakupan sistem pelayanan kesehatan rujukan</i>	450.000.000,00	450.000.000,00		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</i>	% FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) 90%cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan 80%% perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes) 90%	<i>% FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) 92%cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan 85%% perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes) 91%</i>	625.000.000,00	625.000.000,00		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	% Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 100%	<i>% Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 100%</i>	65.000.000,00	65.000.000,00		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	% Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota 100%	<i>% Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota 100%</i>	260.000.000,00	260.000.000,00		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	% Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%	<i>% Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%</i>	300.000.000,00	300.000.000,00		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</i>	Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk 90%Cakupan perijinan sarana kefarmasian 60%	<i>Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk 91%Cakupan perijinan sarana kefarmasian 65%</i>	290.000.000,00	290.000.000,00		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dapat perizinan 100%	<i>jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dapat perizinan 100%</i>	30.000.000,00	30.000.000,00		

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah Rumah Tangga yang diberikan sertifikat untuk sarana produksi alat kesehatan 100%SS	jumlah Rumah Tangga yang diberikan sertifikat untuk sarana produksi alat kesehatan 100%SS	20.000.000,00	20.000.000,00	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100%	jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100%	10.000.000,00	10.000.000,00	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot AirMinum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot AirMinum (DAM)	% Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot AirMinum (DAM) 100%	% Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot AirMinum (DAM) 100%	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	% Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 100%	% Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 100%	10.000.000,00	10.000.000,00	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	% Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 100%	% Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 100%	20.000.000,00	20.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase desa siaga aktif 70%Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM 90%Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat 100%	Persentase desa siaga aktif 72%Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM 91%Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat 55%	600.000.000,00	600.000.000,00	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Desa Siaga Aktif 91%	% Desa Siaga Aktif 91%	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melaksanakan STBMDesa dengan PHBS 100%	Jumlah desa yang melaksanakan STBMDesa dengan PHBS 100%			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun 100%	jumlah UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun 100%			

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%	6.792.993.375,56	6.792.993.375,56		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%	125.080.372,00	125.080.372,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	5.245.655.037,00	5.245.655.037,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.759.910,56	225.759.910,56		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun	1.011.383.144,00	1.011.383.144,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun	185.114.912,00	185.114.912,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air 100 %	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 76,00%	14.305.000.000,00	14.305.000.000,00		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai 100%	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai 100%	4.234.000.000,00	4.234.000.000,00		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 100%	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 100%	10.071.000.000,00	10.071.000.000,00		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 100%	Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan 10/99 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 220 Rekomendasi Teknis	4.845.000.000,00	12.145.000.000,00		

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	Terselenggaranya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 1 Tahun	<i>Terselenggaranya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 1 Tahun</i>	4.845.000.000,00	12.145.000.000,00	
				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ban	<i>Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ban</i>			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 100%	<i>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya 10/99</i>	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan 100%	<i>Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan 100%</i>	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan 100 %	<i>Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap 0.6584 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk 0.001668072</i>	151.627.711.965,44	169.605.886.132,86	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pembangunan Jalan Dan Jembatan 100%	<i>Terlaksananya Pembangunan Jalan Dan Jembatan 100%</i>	151.627.711.965,44	169.605.886.132,86	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang 100%	<i>Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW 50%</i>	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>			125.000.000,00	125.000.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>			950.000.000,00	950.000.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>			225.000.000,00	225.000.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak 58,78%	12.561.142.000,00	16.823.642.000,00	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Air Bersih Layak Sambas	Meningkatnya Cakupan Air Bersih Layak Sambas	12.561.142.000,00	16.823.642.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Meningkatnya akses Sanitasi Layak menjadi 81,93% dan di dalamnya 0,1% Sanitasi Aman	4.766.451.000,00	9.028.951.000,00	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akses Sanitasi Layak bertambah sebanyak 600 KK dan Sanitasi Aman bertambah 120 KK	Akses Sanitasi Layak bertambah sebanyak 600 KK dan Sanitasi Aman bertambah 120 KK	4.766.451.000,00	9.028.951.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota menjadi 14,61% dan berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 0,05%	6.940.000.000,00	11.202.500.000,00	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota menjadi 6.550 meter dan berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 0,05%	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota menjadi 6.550 meter dan berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 0,05%	6.940.000.000,00	11.202.500.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	20.858.400.000,00	25.120.900.000,00	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Kegiatan Konstruksi dan Non Konstruksi	Banyaknya Kegiatan Konstruksi dan Non Konstruksi	20.858.400.000,00	25.120.900.000,00	
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (100%) Persentase PNS pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standar (80%) Persentase dokumen laporan kepegawaian yang sesuai pedoman (100%) Persentase dokumen laporan pengelolaan ke	Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (100%) Persentase PNS pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standar (80%) Persentase dokumen laporan kepegawaian yang sesuai pedoman (100%) Persentase dokumen laporan pengelolaan ke	8.192.250.081,00	8.192.250.081,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (5 dokumen) Jumlah waktu monitoring dan evaluasi (1 tahun)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (5 dokumen) Jumlah waktu monitoring dan evaluasi (1 tahun)	103.227.546,00	103.227.546,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (12 bulan) Jumlah laporan keuangan dan Asset (4 berkas) Jumlah waktu penyediaan administrasi keuangan (1 tahun)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (12 bulan) Jumlah laporan keuangan dan Asset (4 berkas) Jumlah waktu penyediaan administrasi keuangan (1 tahun)	4.565.867.717,00	4.565.867.717,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi dan fasilitas kepegawaian (1 tahun)	Penyediaan administrasi dan fasilitas kepegawaian (1 tahun)	21.930.000,00	21.930.000,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa dan prasarana rutin kantor (1 tahun)	Penyediaan jasa dan prasarana rutin kantor (1 tahun)	132.827.934,00	132.827.934,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan asset, sarana dan prasarana (4 paket)	Pengadaan asset, sarana dan prasarana (4 paket)	2.440.407.259,00	2.440.407.259,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang (1 tahun)	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang (1 tahun)	440.730.407,00	440.730.407,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang (1 tahun)	Jumlah waktu pemeliharaan barang (1 tahun)	324.926.035,00	324.926.035,00		
	Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen birokrasi (2 dokumen)	Jumlah dokumen birokrasi (2 dokumen)	162.333.183,00	162.333.183,00		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Jumlah Durasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kawasan Permukiman Antara Pusat, Provinsi dan Daerah yang di laksanakan - Persentase Jumlah Unit Rumah MBR yang diberikan Bantuan Material di Kawasan Permukiman (DAK)	- Jumlah unit peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera 191	1.176.174.000,00	1.176.174.000,00		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Durasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kawasan Permukiman antara Pusat, Provinsi dan Daerah Yang Dilaksanakan	Jumlah Durasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kawasan Permukiman antara Pusat, Provinsi dan Daerah Yang Dilaksanakan	80.000.000,00	80.000.000,00		

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK) serta Operasional Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)	Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK) serta Operasional Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)	1.096.174.000,00	1.096.174.000,00	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah unit peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR 191	400.000.000,00	400.000.000,00	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Dokumen Perencanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Dokumen Perencanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	400.000.000,00	400.000.000,00	
2.10	PERTANAHAN							
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Jumlah Luas Lahan yang dilakukan Penilaian Harga	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 100%	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Harga Ganti Rugi Tanah/Lahan untuk Pemerintah Kabupaten Sambas	Penilaian Harga Ganti Rugi Tanah/Lahan untuk Pemerintah Kabupaten Sambas	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP							
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup	150.000.000,00	150.000.000,00	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (Penyusunan Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab.Sambas).	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (Penyusunan Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab.Sambas).	150.000.000,00	150.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola (Ha) 210 -Jumlah DAS yang dipantau 4 - Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan) 1 -Jumlah Kampung Iklim yang masuk dalam sistem Registrasi Nasional (Desa) 12	975.000.000,00	975.000.000,00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	725.000.000,00	725.000.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	150.000.000,00	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			100.000.000,00	100.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Tertindakannya Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati 100%	-Persentase kesesuaian program Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola 100% -Jumlah lokasi lahan keaneekaragaman Hayati yang Dikelola 1	1.208.578.417,00	1.208.578.417,00	
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Tertindakannya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1.208.578.417,00	1.208.578.417,00	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas (%) 100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomtek TPS LB3	Jumlah Rekomtek TPS LB3	50.000.000,00	50.000.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan 6.70%	390.000.000,00	390.000.000,00	
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen lingkungan yang dilakukan pengkajian dampak lingkungan 2. Jumlah Kunjungan kerja dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi baik di daerah, propinsi dan pusat 3. Jumlah Usaha/ kegiatan pemegang dokumen LH yang diawasi	1. Jumlah dokumen lingkungan yang dilakukan pengkajian dampak lingkungan 2. Jumlah Kunjungan kerja dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi baik di daerah, propinsi dan pusat 3. Jumlah Usaha/ kegiatan pemegang dokumen LH yang diawasi	390.000.000,00	390.000.000,00	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup target 63,5% 2. Cakupan Pelayanan Izin Lingkungan target 99,63%	Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau kerusakan LH 100%	60.000.000,00	60.000.000,00	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Lingkungan yang di tindaklanjuti	Jumlah kasus Lingkungan yang di tindaklanjuti	60.000.000,00	60.000.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 100%	Persentase Pelayanan Persampahan 44%	8.273.021.583,00	8.273.021.583,00	
		Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	8.273.021.583,00	8.273.021.583,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
1.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan satuan Polisi Pamong Praja 5 orang	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan satuan Polisi Pamong Praja 5 orang	4.884.673.759,24	4.884.673.759,24	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 9 Dokumen	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 9 Dokumen	37.817.500,00	37.817.500,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 8 Dokumen	Meningkatkan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 8 Dokumen	4.218.060.583,24	4.218.060.583,24	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100%	Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100%	30.500.000,00	30.500.000,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100%	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100%	80.000.000,00	80.000.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah 100%	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah 100%	181.501.668,00	181.501.668,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100%	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100%	206.994.008,00	206.994.008,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah 100%	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah 100%	84.800.000,00	84.800.000,00	
		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 100%	Persentase penataan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 100%	45.000.000,00	45.000.000,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 75%, 2. Persentase Gangguan Transtibum yang dapat diselesaikan 100%, 3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 75%, 4. Rasio Linmas 56 orang, 5. Rasio Siskamling Perdesa 2 Pos,	1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan 80%, 2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 75%, 3. Persentase Penegakan PERDA/PERKADA 65%	2.326.905.001,00	2.326.905.001,00	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan gangguan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 75%	Persentase Penanganan gangguan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 75%	1.761.936.668,00	1.761.936.668,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 85%	<i>Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 85%</i>	494.000.000,00	<i>494.000.000,00</i>	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 1 orang	<i>persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 1 orang</i>	70.968.333,00	<i>70.968.333,00</i>	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun	3.046.914.829,16	3.046.914.829,16	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	1.953.221.953,00	1.953.221.953,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	134.192.876,16	134.192.876,16	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	237.000.000,00	237.000.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.500.000,00	96.500.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	140.000.000,00	140.000.000,00	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Kejadian Bencana - 100%	Persentase Penanganan Kejadian Bencana - 100%	840.000.000,00	840.000.000,00	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30.000.000,00	30.000.000,00	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	540.000.000,00	540.000.000,00	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata dan dikelola dengan baik	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata dan dikelola dengan baik	70.000.000,00	70.000.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Sambas - 100%	1. Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota 70% 2. Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota 70%	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	2.430.000.000,00	2.430.000.000,00	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang diinspeksi petugas	Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang diinspeksi petugas	20.000.000,00	20.000.000,00	
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi petugas	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi petugas	10.000.000,00	10.000.000,00	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh pelatihan dalam pencegahan kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh pelatihan dalam pencegahan kebakaran	370.000.000,00	370.000.000,00	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah warga negara yang mendapat layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah warga negara yang mendapat layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	50.000.000,00	50.000.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.06	SOSIAL							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten (100 %)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten (100 %)			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (100 %)	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (100 %)	4.318.930.724,00	4.318.930.724,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen keuangan Perangkat Daerah (100 %)	Persentase tersusunnya dokumen keuangan Perangkat Daerah (100 %)	41.000.000,00	41.000.000,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen barang milik daerah (100 %)	Persentase tersusunnya dokumen barang milik daerah (100 %)	3.236.169.696,00	3.236.169.696,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1 %)	Cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (1 %)	5.500.000,00	5.500.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)	Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)	40.000.000,00	40.000.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (100 %)	Cakupan pengadaan barang milik daerah (100 %)	225.000.000,00	225.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (100 %)	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (100 %)	476.500.000,00	476.500.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (100 %)	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (100 %)	147.911.028,00	147.911.028,00	
		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi			138.850.000,00	138.850.000,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil (10 %)	Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil (20 %)	8.000.000,00	8.000.000,00	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) penerbitan izin Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (80 %)	Persentase (%) penerbitan izin Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (80 %)	270.000.000,00	270.000.000,00	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah (50 %)	Persentase (%) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah (50 %)	40.000.000,00	40.000.000,00	
						230.000.000,00	230.000.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (100 %)	Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (100 %)	85.000.000,00	85.000.000,00	
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (1 Kegiatan)	Jumlah Fasilitas Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (1 Kegiatan)	85.000.000,00	85.000.000,00	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) rehabilitasi sosial urusan SPM kewenangan Kabupaten dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti (50 %)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100%	1.654.500.000,00	1.654.500.000,00	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (100 %)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (100 %)	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (50 %)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (50 %)	529.500.000,00	529.500.000,00	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial (50 %)	- Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 60% - Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial (60%) - Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 60%	1.936.500.000,00	1.936.500.000,00	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase (%) anak-anak terlantar yang dijangkau dan dirujuk (50 %)	Persentase (%) anak-anak terlantar yang dijangkau dan dirujuk (50 %)	30.000.000,00	30.000.000,00	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Desa yang melakukan pemutakhiran Data (100 %)	1. Persentase Desa yang melakukan pemutakhiran Data (100 %)	1.906.500.000,00	1.906.500.000,00	

KABUPATEN SAMBAS

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR & TARGET PROGRAM (OUTCOME) / KEG (OUTPUT)		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI	RKPD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD	RKPD-P	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana (100 %)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	675.000.000,00	675.000.000,00	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (100 %)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (100 %)	495.000.000,00	495.000.000,00	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana (100 %)	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana (100 %)	180.000.000,00	180.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten dalam keadaan baik dan terawat (1 TMP)	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan 100%	140.000.000,00	140.000.000,00	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang terpelihara (1 TMP)	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang terpelihara (1 TMP)	140.000.000,00	140.000.000,00	
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
		PROGRAM PENATAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang tertata (100 %)	1. Persentase Penataan Desa 100% 2. Cakupan Sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik 100%	120.000.000,00	120.000.000,00	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang tertata	Persentase Desa yang tertata	120.000.000,00	120.000.000,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa (50 %) 2. Persentase kawasan perdesaan yang dikembangkan	1. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa (20 %) 2. Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan (100%)	260.000.000,00	260.000.000,00	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	1. Persentase Lembaga Kerjasama Antar Desa Yang aktif (50 %) 2. Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan	1. Persentase Lembaga Kerjasama Antar Desa Yang aktif (50 %) 2. Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan	260.000.000,00	260.000.000,00	

BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PAPBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun 2022.

6.2. Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004